



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PATI
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2024**



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2025.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Ketahanan Pangan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. Dinas Pertanian;
- u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Inspektorat Daerah;

bb. Kecamatan . . .

bb. Kecamatan Pati;
cc. Kecamatan Margorejo;
dd. Kecamatan Tlogowungu;
ee. Kecamatan Gembong;
ff. Kecamatan Tayu;
gg. Kecamatan Margoyoso;
hh. Kecamatan Gunungwungkal;
ii. Kecamatan Cluwak;
jj. Kecamatan Dukuhseti;
kk. Kecamatan Kayen;
ll. Kecamatan Gabus;
mm. Kecamatan Tambakromo;
nn. Kecamatan Juwana;
oo. Kecamatan Trangkil;
pp. Kecamatan Wedarijaksa;
qq. Kecamatan Batangan;
rr. Kecamatan Jakenan;
ss. Kecamatan Jaken;
tt. Kecamatan Winong;
uu. Kecamatan Pucakwangi;
vv. Kecamatan Sukolilo; dan
ww. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Isi beserta uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 11 Desember 2024

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati
Nomor : 35 Tahun 2024
Tanggal : 11 Desember 2024

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2025

RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PATI
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DinsosP3KB) Kabupaten Pati Tahun 2025 dilakukan dalam rangka memberikan informasi dan gambaran program serta kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan yaitu Tahun 2025, termasuk hasil-hasil yang diharapkan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana. Oleh karena itu yang akan menjadi materi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2025 adalah Program

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.

Acuan utama yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2025 adalah rumusan tujuan, sasaran agenda pembangunan dan prioritas program pembangunan dengan memperhatikan dinamika dari isu strategis bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta kondisi daerah.

Rencana Kerja PD disusun dengan tahapan persiapan penyusunan renja PD, Penyusunan rancangan awal Renja PD, Pelaksanaan forum PD dan Penetapan Renja PD. Persiapan sebagaimana dimaksud, meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala PD tentang pembentukan tim penyusun Renja PD, orientasi mengenai Renja PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan Renja PD disusun mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud di atas, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Renstra PD, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk

tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi, menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal PD.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) memerlukan perencanaan, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek agar dapat berjalan pada jalur yang tepat. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun mengacu kepada :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 25 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJM Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional;
- c. Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran RPJM;

- d. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu satu tahun yang merupakan penjabaran Renstra yang tersusun dalam Rencana Kerja OPD tahun 2025;

Renstra PD, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD selaras dengan Renstra PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi, menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2024 ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;
- 9 Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026;
- 10 Peraturang Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang rencana Kerja Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

- 11 Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.
- 12 Surat Edaran Bupati Pati Nomor 050/2079.6 tanggal 22 Juli 2024 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025;

1.3. Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati dimaksudkan untuk :

- 1 Memberikan kerangka serta arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan untuk satu tahun ke depan dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program, serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati kepada Bupati.
- 2 Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar OPD, antar fungsi maupun antar Pusat dan Daerah;
- 3 Sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati selama 1 tahun kedepan.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja yaitu :

- 1 Sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan jangka pendek tahunan/ Rencana

Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sehingga perencanaan lebih terarah;

- 2 Sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Organisasi Perangkat daerah (RKA OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati dalam 1 tahun kedepan.
- 3 Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- 4 Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- 5 Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka, sistematika yang dipergunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
- 4.2 Manajemen Risiko Program Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian PD

Dari evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2023 maka hampir di semua program, kegiatan, dan sub kegiatan pencapaiannya 100%, ada beberapa kegiatan yang tidak dialokasikan anggarannya dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga anggaran yang ada di berikan kepada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas PD.

Program pembinaan keluarga berencana dengan indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) memiliki capaian 10%, memenuhi target Renstra tahun 2023 sebesar 10% (capaian 100%). ketercapaian indikator tersebut didorong oleh faktor yang salah satunya adalah kemudahan dalam mendapatkan layanan alat dan obat kontrasepsi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas pembangunan pada saat ini, salah satunya melalui peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga, arah dan kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di fokuskan kepada peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program keluarga berencana. Untuk mendukung kebijakan tersebut diperlukan empat elemen utama yaitu pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai salah satu program pokok untuk mencapai kesejahteraan keluarga perlu didasari pada konsepsi Pembudayaan dan Pemberdayaan keluarga

kecil, karena pengendalian laju pertumbuhan penduduk dapat dilakukan apabila peran serta masyarakat luas untuk memiliki keluarga kecil dapat dilakukan, sehingga terjadi keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta upaya pemberdayaan keluarga agar dapat menggunakan potensi lingkungannya akan lebih optimal. Dengan demikian Visi Mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang (Keluarga Kecil yang berkualitas) yang menjadi tujuan penyelenggaraan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di masa depan secara bertahap dapat diwujudkan.

Pada tahun 2023, menurut rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat kabupaten oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati, jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS). Indikator kinerja persentase peserta KB aktif terhadap PUS, pada tahun 2023 terealisasi 70,74%.

Peningkatan kesejahteraan keluarga telah banyak dilakukan melalui peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan ekonomi produktif yang pada saat ini dilakukan melalui kelompok UPPKS, yang ditujukan untuk menanggulangi peningkatan keluarga miskin/ Keluarga Pra sejahtera alasan ekonomi.

Seiring dengan proses pembangunan sumber daya manusia di segala bidang dan tingkatan, tidak kalah pentingnya adalah dengan mensyaratkan keikutsertaan semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan diharapkan mempunyai partisipasi yang sama dengan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Namun seringkali tak disadari bahwa kebijakan dan program pembangunan ternyata belum mempertimbangkan dampak dan manfaat yang adil bagi perempuan.

Pada kenyataannya perempuan belum mendapatkan manfaat pembangunan secara proporsional, Untuk Indeks pembangunan gender (IPG) pada tahun 2022 tercapai 92,42 dan Tahun 2023 sebesar 92,46, Dan untuk indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten pati pada

tahun 2022 tercapai 68,65 dan Tahun 2023 sebesar 67,73. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dari aspek Indeks pembangunan manusia maupun gender kesetaraan gender mengalami penurunan.

Adapun untuk urusan sosial mempunyai tugas yaitu menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tujuan ini mempunyai indikator persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan target awal 835% dan baru tercapai 20,89%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* Kabupaten Pati tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2024
(tahun berjalan)* Kabupaten Pati

Dinas Sosial P3AKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun n-1 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2024	
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	10	$11=(10/4)*100$	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase kecamatan yang aktif melakukan pemutakhiran data PMKS	100%		100%	100%	100%	100%	
1	06	02	203	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja sosial dan TKSK yang meningkat kapasitasnya	96%		96%	96%	100%	

1	06	02	203	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang		75 Orang			75 Orang			Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	02	203	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	84 orang		21 orang	21 orang	100%	176 orang	176 orang	100%	
						Jumlah janda/veteran perang yang mandiri secara sosial ekonomi	620 orang		155 Orang		155 Orang				Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	02	203	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	208 keluarga		52 Keluarga		52 Keluarga				Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	02	203	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 sertifikat		10 Sertifikat		10 Sertifikat				Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100%		100%		100%				Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	03	201		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi kepulangannya	8 orang		2 Orang	2 Orang					Kegiatan tidak dilaksanakan

1	06	03	201	01	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	8 orang		2 orang		2 orang					Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	0.90%		0.60%	0.60%	100%	0,7%	0,7%	100%		
1	06	04	20	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, Jumlah anak terlantar yang tertangani, Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, Jumlah gelandangan pengemis di luar panti sosial yang tertangani	47 orang		32 orang	32 orang	100%	40 orang	40 orang	100%		
1	06	04	201	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3500 orang		360 orang	360 orang	100%	3500 orang	3500 orang	100%		
1	06	04	201	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	160 orang		40 orang	40 orang	100%	40 orang	40 orang	100%		
1	06	04	201	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	850 orang		200 orang	200 orang	100%	267 orang	267 orang	100%		
1	06	04	201	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang		5 orang	5 orang	100%	5 orang	5 orang	100%		

1	06	04	201	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang		25 orang	25 orang	100%	30 orang	30 orang	100%	
1	06	04	201	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%		25 orang	25 orang	100%	25 orang	25 orang	100%	
1	06	04	201	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang		15 orang	15 orang	100%	15 orang	11 orang	43,33%	
1	06	04	201	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang		5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	4 Orang	45%	
1	06	04	201	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang		20 orang	20 orang	100%	20 orang	16 orang	45%	
1	06	04	201	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang		20 orang	20 orang	100%	20 orang	16 orang	45%	
1	06	04	201	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang		20 orang	20 orang	100%	20 orang	16 orang	45%	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan anak terlantar yang tertangani	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	05	20	1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah pelayanan terhadap anak terlantar yang ditangani	240 orang		20 orang	0	0	20 orang	16 orang	45%	Kegiatan tidak dilaksanakan TA 2023

1	06	05	201	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang		20 orang			20 orang	20 orang	100%	
1	06	05	201	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang		20 orang			20 orang			Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	05	201	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang		20 orang			20 orang			Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	05	202	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	406 desa		406 desa	406 desa	100%	406 desa	406 desa	100%	
1	06	05	202	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	662,028 orang		175,649 orang			168.623 orang			Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	05	202	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	164,659 keluarga		100 keluarga	100 keluarga	100%	41.970 Keluarga	41.970 Keluarga	41.970 Keluarga	
1	06	05	202	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	164,659 keluarga		43,719 keluarga			41,970 keluarga			Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	05	202	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 orang		45 orang		45 orang				Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	06	202	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan perlindungan bencana alam	60,000 orang		15,000 orang			15.000 orang	15.000 orang	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023

1	06	06	201	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	60,000 orang		15,000 orang			40 orang	40 orang	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023
1	06	06	201	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60,000 orang		15,000 orang			40 orang	40 orang	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023
1	06	06	201	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	20 unit		5 Unit			5 Unit			Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	06	201	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang		500 orang			500 orang			Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	06	201	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang		500 orang			500 orang			Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	06	202		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	20 kampung		5 kampung	5 kampung	100%	5 kampung	5 kampung	100%	
1	06	06	202	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 kampung		5 kampung			5 kampung			Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	06	202	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang		30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	100%	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

1	06	07	201	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	1 TMP		1 TMP	1 TMP	100%	1 TMP	1 TMP	100%	
1	06	07	201	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1	06	07	201	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4 makam		1 makam			1 makam		Kegiatan tidak dilaksanakan
1	06	07	201	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4 laporan		1 laporan			1 laporan		Kegiatan tidak dilaksanakan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	100%		25%	25%	100%	50%	50%	100%
2	08	02	201		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang mengikuti pelatihan PPRG	129 PD		13 PD	13 PD	100%	26 PD	26 PD	100%

2	08	02	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	129 dokumen		13 dokumen			26 dokumen			Kegiatan tidak dilaksanakan
2	08	02	201	06	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	30 PD		13 perangkat daerah	13 perangkat daerah	100%	26 Perangkat Daerah	26 Perangkat Daerah	100%	
2	08	02	202		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi masyarakat perempuan (bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi) yang mengikuti advokasi dan sosialisasi	100%		25 organisasi	1 organisasi	4%	1 organisasi	1 organisasi	100%	
2	08	02	202	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
2	08	02	202	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 organisasi		25 organisasi			25 organisasi			Kegiatan tidak dilaksanakan
2	08	02	202	03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan sarana dan KIE	427 lembaga		21 lembaga			135 lembaga			Kegiatan tidak dilaksanakan
2	08	02	203	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 orang		50 orang			50 orang			Kegiatan tidak dilaksanakan

2	08	02	203	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	427 dokumen		21 dokumen			135 dokumen			Kegiatan tidak dilaksanakan
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	03	20	1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	8 kali					2 kali	2 kali	100%	
2	08	03	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 dokumen		2 dokumen			2 dokumen			Kegiatan tidak dilaksanakan
2	08	03	20	2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT	11 kasus		4 kasus	4 kasus	100%	3 kasus	3 kasus	100%	
2	08	03	202	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	11 orang		4 orang	4 orang	100%	3 orang	3 orang	63,64	
2	08	03	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang					3 layanan	3 layanan	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan TA 2023

2	08	03	203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga penanganan perlindungan perempuan yang terlatih	99 orang		25 orang		25 orang			25,23%	Kegiatan tidak dilaksanakan	
2	08	03	203	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	99 orang		25 orang		25 orang		25,23%	Kegiatan tidak dilaksanakan	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani	100%		100%			100%	100%	100%	
2	08	04	201		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah	26 laporan		3 laporan			5 laporan	5 laporan	100%	
2	08	04	201	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	26 laporan		3 laporan			5 dokumen	5 dokumen	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan TA 2023
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterisian data gender dan anak	100%		25%	25%	100%	80%	80%	80%	
2	08	05	201		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	100 dokumen		25 dokumen	25 dokumen	100%	25 dokumen	25 dokumen	100%	
2	08	05	201	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 dokumen		25 dokumen	25 dokumen	100%	25 dokumen	25 dokumen	100%	

2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	75%		30%			50%	50%	50%	
2	08	06	20	1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan terkait PHA	80 lembaga		20 lembaga			20 lembaga	20 lembaga	100%	
2	08	06	20	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	80 organisasi		20 organisasi			20 organisasi	20 organisasi	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan TA 2023
2	08	06	20	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan dan pelayanan KIE	29 lembaga		4 lembaga			6 lembaga	6 lembaga	100%	
2	08	06	20	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3,600 orang		900 orang			900 orang	900 orang	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan TA 2023
2	08	06	20	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4,000 dokumen		1,000 dokumen						Kegiatan tidak dilaksanakan

2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%		8%	8%	100%	100%	100%	100%	
2	08	07	201		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	41 PD		8 PD	8 PD	100%	10 PD	10 PD	100%	
2	08	07	201	05	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	41 PD		8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	100%			26,83%	Kegiatan tidak dilaksanakan TA 2024
2	08	07	202		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	41 orang					11 anak	11 anak	26,83%	
2	08	07	202	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak wewenang kabupaten/ kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota	41 PD		8 PD	8 PD	100%	10 PD	8 PD	39,24%	Kegiatan tidak dilaksanakan TA 2024
2	08	07	202	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	64 orang					11 orang	11 orang	17,19	Kegiatan tidak dilaksanakan TA 2023
2	08	07	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	24 lembaga					6 lembaga	6 lembaga	100%	

2	08	07	203	07	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	20 dokumen					8 dokumen	8 dokumen	40%	Kegiatan tidak dilaksanakan TA 2023
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase cakupan penyediaan informasi data keluarga	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	35 -39		35-39 tahun	35-39 tahun	100%	35-39 tahun	35-39 tahun	100%	
						Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per seribu perempuan di kelompok umur yang sama	0.578		0.581	0.581	100%	0.58	0.58	100%	
2	14	02	20	2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan dan KB	84 laporan		21 laporan	21 laporan	100%	21 laporan	21 laporan	50%	
2	14	02	202	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	24 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	50%	
2	14	02	202	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	84 laporan		21 laporan	21 laporan	100%	21 laporan		25%	Kegiatan hanya di TaA 2023

2	14	02	202	12	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	84 laporan		21 laporan			21 laporan	21 laporan	50%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023
2	14	02	202	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	252 dokumen		252 dokumen	252 dokumen	100%	21 dokumen	21 dokumen	100%	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7%		10%	10%	100%	9%	9%	100%	
2	14	03	20	1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi Program Bangga Kencana dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	44 dokumen		543 dokumen	543 dokumen	100%	11 dokumen	11 dokumen	100%	
2	14	03	201	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	84 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	21 laporan	21 laporan	100%	
2	14	03	201	09	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	8 unit		2 unit			2 unit			Kegiatan tidak dilaksanakan
2	14	03	201	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	84 laporan		21 laporan	21 laporan	100%	21 laporan	21 laporan	100%	

2	14	03	201	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	84 laporan		21 laporan	21 laporan	100%	21 laporan	21 laporan	100%	
2	14	03	201	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	20 dokumen		5 dokumen	5dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	50%	
2	14	03	201	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	60 organisasi		15 organisasi	15 organisasi	100%	15 organisasi	15 organisasi	50%	
2	14	03	202		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader KB yang terlatih	1,624 orang		812 kader	812 kader	100%	406 orang	406 orang	50%	
2	14	03	202	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,624 orang		406 orang	406 orang		406 orang	406 orang	50%	
2	14	03	202	06	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Jumlah hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana(pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	63 laporan		21 laporan			21 laporan	21 laporan	33,33%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023

2	14	03	20	3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang disalurkan	136,081 alkon		31,363 alkon			33500alokon	33500alokon	24,62%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023
						Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan	136,081 orang		1,530 orang	1,530 orang	100%	33500 orang	33500 orang	25,74%	
2	14	03	203	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	230 laporan		56 laporan	56 laporan	100%	57 laporan	57 laporan	49,13	
2	14	03	203	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	213,020 orang		1,436 orang	1,436 orang	100%	200 orang	200 orang	0,76%	
2	14	03	203	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 dokumen		1 dokumen			1 dokumen		0%	Kegiatan tidak dilaksanakan
2	14	03	203	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	20 unit		26 unit	26 unit	100%			130%	Kegiatan dilaksanakan di TA 2023
2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	48 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	50%	
2	14	03	203	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	37,550 orang		8,636 orang	1517 orang	17,57%	9,138	1667	28,80	

2	14	03	204		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	230 kelompok		68 kelompok	68 kelompok	100%	68 kelompok	68 kelompok	59,13%	
2	14	03	204	02	Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	63 dokumen					21 dokumen	21 dokumen	33,33%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023
2	14	03	204	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 laporan		4 laporan			4 laporan		0%	Kegiatan tidak dilaksanakan
2	14	03	204	06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	230 kampung		56 kampung	56 kampung	100%	54 kampung	54 kampung	47,83%	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang meningkat kesejahteraan keluarganya	60.50%		59,66%	59,66%	100%	60%	60%	60%	
2	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah BKB, BKR, BKL yang terbina	466 kelompok		106 kelompok	106 kelompok	100%	106 kelompok	106 kelompok	45,49%	
2	14	04	201	16	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	63 laporan					21 laporan	21 laporan	33,33%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023

2	14	04	201	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	220 PIK-R		20 unit	20 unit	100%	25 Unit	25 Unit	22,73%	
2	14	04	201	24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	4,000 orang		3,060 orang	3,060 orang	100%			76,5	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2024
2	14	04	201	28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	107.000 PIK-R		23.000 PIK-R	23.000 PIK-R	100%	27.000 PIK-R	27000 PIK-R	46,73%	
2	14	04	20	2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pameran produk UPPKS dan jumlah peserta yang mengikuti pameran produk UPPKS	4 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	50%	

2	14	04	202	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	16 laporan		4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	50%	
2	14	04	202	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	50%	
X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	50%	
X	XX	01	20	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	50%	
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen		2	2	100%	2 dokumen	2 dokumen	50%	
X	XX	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen		1	1	100%	1 dokumen	1 dokumen	50%	
X	XX	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen		1	1	100%	1 dokumen	1 dokumen	50%	
X	XX	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen		1	1	100%	1 dokumen	1 dokumen	50%	

X	XX	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen		1	1	100%	1 dokumen	1 dokumen	50%	
X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 laporan		12	12	100%	12 laporan	12 laporan	50%	
X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan		4	4	100%	4 laporan	4 laporan	50%	
X	XX	01	202	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	50%	
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 orang		30 orang	30 orang	100%	20 orang	20 orang	50%	
X	XX	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 dokumen		2 Dokumen			2 dokumen		0%	Kegiatan tidak dilaksanakan
X	XX	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 dokumen		2 Dokumen			2 Dokumen		0%	Kegiatan tidak dilaksanakan
X	XX	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 dokumen		2 Dokumen			2 Dokumen		0%	Kegiatan tidak dilaksanakan
X	XX	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan		1	1	100%	1 laporan	1 laporan	50%	
X	XX	01	202	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	8 dokumen		2 dokumen			2 dokumen			Kegiatan tidak dilaksanakan
X	XX	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8 laporan		2	2	100%	2 laporan	2 laporan	100%	

X	XX	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 dokumen		2 dokumen			2 dokumen	2 dokumen	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023
X	XX	01	20	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%	
X	XX	01	203	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8 laporan					2 laporan	2 laporan	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023
X	XX	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 laporan		2 laporan			2 laporan			Kegiatan tidak dilaksanakan
X	XX	01	20	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%	
X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket					1 paket	1 paket	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023
X	XX	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023
X	XX	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023
X	XX	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 orang					50 orang	50 orang	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023
X	XX	01	20	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket		1 paket			1 paket			Kegiatan tidak dilaksanakan
X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket		5 paket	5 paket	100%	5 paket	5 paket	100%	

X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,000 laporan		250 laporan	250 laporan	100%	500 laporan	500 laporan	100%	
X	XX	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023
X	XX	01	207	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan						1 Unit	1 Unit	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan di TA 2023
X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 paket		52 unit	52 unit	100%	10 unit	10 unit	100%	
X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit		10 unit	10 unit	100%	5 unit	5 unit	100%	
X	XX	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 unit		10 unit			10 unit			Kegiatan tidak dilaksanakan
X	XX	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 unit		10 unit			10 unit			Kegiatan tidak dilaksanakan
X	XX	01	208	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 laporan		5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	100%	
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	

X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 laporan		5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	100%	
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	304 unit		76 unit	76 unit	100%	76 unit	76 unit	100%	
X	XX	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 unit		10 unit			10 unit			Kegiatan tidak dilaksanakan
X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit		10 unit			10 unit			Kegiatan tidak dilaksanakan
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	4 unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%	
X	XX	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit		1 unit			1 unit			Kegiatan tidak dilaksanakan
X	XX	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit		1 unit			1 unit			Kegiatan tidak dilaksanakan

Dari tabel diatas di kolom capaian renstra ada yang sudah tercapai 100% dari target dikarenakan :

1. Target capaian dan pelaksanaan dilaksanakan hanya sekali dalam empat tahun;
2. Adanya kegiatan yang semula tidak ada di Renstra dimunculkan setelah ada perubahan pergeseran pemetaan program dari pusat.

Sementara program kegiatan renstra belum mencapai target dikarenakan :

1. Adanya beberapa program dan kegiatan di renstra yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan SDM;
2. Pelaksanaan kegiatan di lapangan yang sulit diprediksi kedepannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Masyarakat

2.2.1 Review (analisis) atas capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja dalam NSPK, SPM, dan IKK

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati mempunyai tugas pelayanan kepada masyarakat meliputi tiga pelayanan yaitu pelayanan sosial, pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang merupakan indikator dari tujuan dan sasaran baik di urusan sosial, PPPA dan urusan KB serta Pembangunan Keluarga hampir semuanya tercapai. serta untuk urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang hanya ada di urusan sosial semua tercapai 100%.

Untuk mencapai capaian target tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pati dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Dukungan sistem informasi berbasis internet mempermudah dalam pelayanan;

2. Dukungan dari Provinsi dan Pusat terkait pemberian logistik kebencanaan;
3. Terbentuknya UPTD PPPA yang sangat membantu dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Dukungan dari BKKBN terkait alokasi anggaran di Bidang KB;
5. Untuk pelaksanaan SPM sangat terbantu dengan kerjasamanya peksos, Tagana, TKSK, Panti rehabilitasi di Provinsi Jawa Tengah serta Tim SPM.

Dalam penilaian dari pelayanan tersebut diatas, terdapat indikator-indikator yang harus terpenuhi, yaitu indikator kinerja Renstra, dan indikator kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal). Tetapi di indikator kinerja SPM hanya terdapat pelayanan sosial.

Capaian indikator kinerja Renstra, dan indikator kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pati Tahun 2023 dan proyeksi tahun berikutnya tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati
Tahun 2023

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IK Renstra PD 2023-2026											
	BIDANG KB PK											
1	Persentase Tingkat Kesejahteraan Keluarga			59,66	60,00	60,25	60,50	63,07	63,07	63,07	63,07	
2	<i>TFR (Angka Kelahiran Total)</i>			1,66	1,66	1,66	1,66	1,53	1,66	1,66	1,66	
3	<i>Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)</i>			59,66	60,00	60,25	60,50	63,07	63,07	63,07	63,07	
	BIDANG PPPA											
1	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)			67,10	68,00	69,15	71,05	67,73	68,00	69,15	71,05	
2	<i>Presentase ARG Pada Belanja Langsung APBD</i>			1,9	2,0	2,1	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	
3	<i>Indeks Perlindungan Anak (IPA)</i>			74,18	76,01	77,93	79,83	68,63	76,01	77,93	79,83	
4	<i>Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)</i>			0,000003	0,000005	0,000005	0,000005	0,000059	0,000005	0,000005	0,000005	
	BIDANG SOSIAL											

1 5	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			5,8 3	5,8 2	5,8 1	5,8 0	2,4 2	5,8 2	5,8 1	5,8 0	
2	<i>Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</i>			5,8 3	5,8 2	5,8 1	5,8 0	2,4 2	5,8 2	5,8 1	5,8 0	
	IK SPM											
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			100	100	100	100	100	100	100	100	

5	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			100	100	100	100	100	100	100	100	
---	---	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

2.2.2 Review Data Series Gambaran Urusan Perangkat Daerah

Dari tahun ke tahun kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pati mengalami capaian yang fluktuatif.

Data series Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pati dimuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Data Series Gambaran Urusan Sosial, PPPA Dan KB Di Kabupaten Pati
Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	66.154	100.879	72.750	98.190	287.416
2	Jumlah PPKS yang ditangani	Orang	2.659	7.638	5.930	7442	135987
3	Jumlah PPKS yang direhabilitasi	Orang	2.659	25	50	100	45
a	Penyandang disabilitas terlantar	Orang		200	200	200	400
b	Anak terlantar	Orang		30	25	25	30
c	Lanjut usia terlantar	Orang	226	20778	2682	50	60
d	Gelandang/penge mis di luar panti sosial	Orang		200	25	25	30
4	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang tertangani	Orang	239	205	160	585	820

5	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bansos Kesejahteraan Keluarga						
a	PKH	Keluarga	56.491	50.313	44.494	62.767	54.447
b	BPNT	Orang		170.465	128.966	127.658	122.569
c	BLT Dana Desa						
6	Jumlah pekerja sosial dan TKSK yang meningkat kapasitasnya	Orang	21	21	21	21	21
7	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya	Lembaga	13	13	13	13	13
8	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Orang		0	0	0	0
9	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan ssi standar gizi	Orang				21936	735
10	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang dan lainnya			0	0	0	0

11	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan alat bantu/peraga sesuai kebutuhan	Orang						7
----	--	-------	--	--	--	--	--	---

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

2.3.1 Tingkat Kerja dan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

Tingkat Kinerja dan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati ditentukan berdasarkan capaian target terhadap indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2023-2026.

Tahun 2025 merupakan tahun ke-3 Renstra 2023 – 2026 sehingga dijelaskan pada capaian target adalah kondisi kinerja pada Tahun 3 (2025) sebagai berikut :

a Indikator Tujuan

1) Persentase Penurunan PMKS

Pada indikator tujuan pertama yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dimana pada tahun 2025 mentargetkan 5,81.

2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pada indikator tujuan kedua yaitu indeks pemberdayaan gender pada tahun 2025 mentargetkan 69,15.

3) Persentase Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Untuk indikator ketiga yaitu persentaser tingkat kesejahteraan keluarga dengan target 60,25.

b Indikator sasaran

1) Persentase Penurunan PMKS

Untuk sasaran pertama yaitu persentase penurunan PMKS di tahun 2025 ditargetkan 5,81.

2) Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD

Untuk sasaran kedua yaitu persentase ARG pada belanja langsung APBD pada tahun 2025 ditargetkan 2,1.

3) Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Untuk sasaran ketiga yaitu indeks perlindungan anak pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 77,93.

4) Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Untuk sasaran keempat yaitu rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada tahun 2025 ditargetkan 0,000005

5) TFR (Angka Kelahiran Total)

Untuk sasaran kelima yaitu TFR (angka kelahiran total) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 1,66

6) Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

Untuk sasaran keenam dengan indikator indeks pembangunan keluarga ditargetkan sebesar 60,25.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati adalah :

1) Urusan Sosial

- a) Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial meningkat dan yang tertangani masih rendah;
- b) Belum optimalnya perlindungan sosial korban bencana alam.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan hukum;
- b) Masih terjadi kekerasan terhadap anak.
- 3) Urusan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - a) Jumlah keluarga prasejahtera meningkat;
 - b) Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun meningkat drastis;
 - c) Prevalensi KB masih relatif rendah;
 - d) Terjadi penurunan unmet need, namun jumlahnya masih relatif tinggi.

b. Hambatan

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati adalah :

- 1) Kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.
- 2) Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Kurangnya sarana prasarana di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.

2.3.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

a. Tantangan

Tantangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati dalam meningkatkan pelayanan adalah :

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dan perangkat desa mengenai kevalidan data terpadu kesejahteraan sosial di tingkat desa;
- 2) Tidak dapat diprediksi datangnya bencana;

- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan regulasi PBI APBD maupun PBI Kesehatan;
- 4) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang stunting yang salah satu faktornya adalah menikah di usia masih muda.

b. Peluang

Peluang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati dalam meningkatkan pelayanan adalah :

- 1) Masyarakat dapat memanfaatkan web atau aplikasi tentang pelayanan di Perangkat Daerah;
- 2) Memberdayakan secara maksimal tenaga relawan;
- 3) Kemudahan dalam pengurusan surat rekomendasi reaktivasi BPJS Kesehatan;
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pemakaian alat dan obat kontrasepsi.

2.3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang terkandung dalam Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2024 yang menjadi ranah penanganan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah :

- a. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. Peningkatan pemberdayaan perempuan daerah;
- c. Laju pertumbuhan penduduk tinggi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas

pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan analisis kebutuhan untuk Tahun 2025 terdapat sebanyak 15 Program, 31 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan, karena tidak semua program kegiatan dan sub kegiatan mampu dilaksanakan karena terkendala oleh beberapa hal seperti SDM dan anggaran yang terbatas. dengan tidak semua program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan, maka anggaran di Renstra TA 2025 dengan anggaran kebutuhan di TA2025 sangat jauh berbeda.

Untuk lebih jelasnya, review Rancangan Awal RKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Tahun 2025

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra PD Th 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				3.435.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1.477.436,5	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase kecamatan yang aktif melakukan pemutakhiran data PMKS	100%	628.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase kecamatan yang aktif melakukan pemutakhiran data PMKS	100%	300.000	
	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah Pekerja sosial dan TKSK yang meningkat kapasitasnya</i>	<i>96 orang</i>	<i>628.000</i>	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah Pekerja sosial dan TKSK yang meningkat kapasitasnya</i>	<i>96 orang</i>	<i>300.000</i>	

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	13.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	21 orang	390.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	21 orang	300.000	
	Kabupaten Pati	Jumlah janda/veteran perang yang mandiri secara sosial ekonomi	155 orang	200.000		Kabupaten Pati	Jumlah janda/veteran perang yang mandiri secara sosial ekonomi	0	0	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	52keluarga	13.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kabupaten Pati	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	12.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kabupaten Pati	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	30.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	0	0	
<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal</i>		<i>Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi kepulungannya</i>	<i>2 orang</i>	<i>30.000</i>	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal</i>		<i>Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi kepulungannya</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Kabupate n Pati	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 otang	30.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Kabupate n Pati	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	0	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	0,80 %	2.299.650	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	0,80%	923.000	

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, Jumlah anak terlantar yang tertangani, Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, Jumlah gelandangan pengemis di luar panti sosial yang tertangani	47 orang	2.299.650	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, Jumlah anak terlantar yang tertangani, Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, Jumlah gelandangan pengemis di luar panti sosial yang tertangani	47 orang	923.000	
Penyediaan Permakanan	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3500 orang	1.400.000	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3500 orang	190.000	
Penyediaan Sandang	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	6.050	Penyediaan Sandang	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	5.000	
Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	225 orang	740.000	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	225 orang	650.000	

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	12.100	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Pati	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	62.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Pati	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	65.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Pati	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	19.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Pati	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	13.000	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	12.100	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	12.100	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	

Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	12.100	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	12.100	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
Pemberian Layanan Rujukan	Kabupaten Pati	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	12.100	Pemberian Layanan Rujukan	Kabupaten Pati	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Cakupan anak terlantar yang tertangani	100anak	159.300	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Cakupan anak terlantar yang tertangani	0	0	
		Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan					Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan			
<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>		<i>Jumlah pelayanan terhadap anak terlantar yang ditangani</i>	<i>20 dokumen</i>	<i>36.300</i>	<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>		<i>Jumlah pelayanan terhadap anak terlantar yang ditangani</i>	<i>20 dokumen</i>	<i>5.000</i>	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Pati	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 anak	12.100	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Pati	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 anak	5.000	
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Pati	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 anak	12.100	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Pati	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	

	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kabupaten Pati	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 anak	12.100	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kabupaten Pati	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan</i>	<i>406 desa</i>	<i>123.000</i>	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan</i>	<i>406 desa</i>	<i>71.000</i>	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	161878 orang	13.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	0	0	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40291 keluarga	35.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40291 keluarga	41.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Pati	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40291 keluarga	15.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Pati	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40291 keluarga	30.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Pati	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45 orang	60.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Pati	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	187.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	158.437,5	
	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan perlindungan bencana alam</i>	<i>15000 orang</i>	<i>130.000</i>	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan perlindungan bencana alam</i>	<i>15000 orang</i>	<i>14.437,5</i>	
	Penyediaan Makanan	Kabupat en Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	15000 orang	35.000	Penyediaan Makanan	Kabupat en Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	15000 orang	9.437,5	
	Penyediaan Sandang	Kabupat en Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15000 orang	35.000	Penyediaan Sandang	Kabupat en Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15000 orang	5.000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kabupat en Pati	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 tempat	20.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kabupat en Pati	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	

	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	20.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kabupaten Pati	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	20.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kabupaten Pati	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk</i>	<i>5 kampung</i>	<i>57.000</i>	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk</i>	<i>5 kampung</i>	<i>144.000</i>	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kabupaten Pati	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	5 kampung	22.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kabupaten Pati	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	35.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	144.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang terpelihara	100 %	131.100	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang terpelihara	100%	19.999	
	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah TMP yang terpelihara</i>	<i>1 TMP</i>	<i>131.100</i>	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah TMP yang terpelihara</i>	<i>1 TMP</i>	19.999	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupat en Pati	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupat en Pati	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokume n	19.999	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupat en Pati	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	55.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupat en Pati	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	0	0	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupat en Pati	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 laporan	26.100	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupat en Pati	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	0	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				363.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				283.000	
PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase PD yang berpartisipasi dalam pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	75 %	124.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase PD yang berpartisipasi dalam pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	75 %	62.528	
<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah PD yang mengikuti pelatihan PPRG</i>	<i>39PD</i>	<i>20.000</i>	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah PD yang mengikuti pelatihan PPRG</i>	<i>39 PD</i>	<i>32.543</i>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kabupat en Pati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	39 dokumen	10.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kabupat en Pati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Pati	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	39 PD	10.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Pati	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	39 PD	31.543	
	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah organisasi masyarakat perempuan (bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi) yang mengikuti advokasi dan sosialisasi</i>	<i>25 organisasi</i>	<i>84.000</i>	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah organisasi masyarakat perempuan (bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi) yang mengikuti advokasi dan sosialisasi</i>	<i>25 organisasi</i>	<i>30.985</i>	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Pati	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	74.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Pati	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.985	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Pati	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 organisasi	10.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Pati	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah lembaga yang mendapatkan sarana dan KIE</i>	<i>135 lembaga</i>	<i>20.000</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah lembaga yang mendapatkan sarana dan KIE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 lembaga	10.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	0	

	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	135 dokumen	10.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	0	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	100 %	44.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	100%	20.472	
	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan</i>	<i>2 laporan</i>	<i>8.000</i>	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan</i>	<i>2 laporan</i>	<i>4.140</i>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	8.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	4.140	

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah kasus KDRT	100 kasu	28.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah kasus KDRT	100%	16.332	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	2 orang	20.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	2 orang	16.332	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 dokumen	8.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 dokumen	5.330	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah tenaga penanganan perlindungan perempuan yang terlatih	24 orang	8.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah tenaga penanganan perlindungan perempuan yang terlatih	0	0	

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	24 orang	8.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	0	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani	100%	20.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani	100%	11.700	
<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah</i>	<i>8 laporan</i>	<i>20.000</i>	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah</i>	<i>8 laporan</i>	<i>11.700</i>	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 laporan	20.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 laporan	11.700	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase keterisian data gender dan anak	90%	20.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase keterisian data gender dan anak	90%	22.000	

<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah dokumen data gender dan anak</i>	<i>25 dokumen</i>	<i>20.000</i>	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah dokumen data gender dan anak</i>	<i>25 dokumen</i>	<i>22.000</i>	
<i>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kabupaten Pati</i>	<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia</i>	<i>25 dokumen</i>	<i>20.000</i>	<i>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kabupaten Pati</i>	<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia</i>	<i>25 dokumen</i>	<i>22.000</i>	
<i>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</i>		<i>Persentase lembaga pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak</i>	<i>60 %</i>	<i>57.000</i>	<i>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</i>		<i>Persentase lembaga pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak</i>	<i>60%</i>	<i>68.300</i>	
<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan terkait PHA</i>	<i>20 lembaga</i>	<i>19.000</i>	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan terkait PHA</i>	<i>20 lembaga</i>	<i>10.000</i>	

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 PD	19.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 PD	10.000	
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan dan pelayanan KIE</i>	<i>8 lembaga</i>	<i>38.000</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan dan pelayanan KIE</i>	<i>8 lembaga</i>	<i>58.300</i>	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	900 anak	19.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	900 anak	58.300	

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 dokumen	19.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	98.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	98.000	
<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah PD yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak</i>	<i>11 PD</i>	<i>38.000</i>	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah PD yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak</i>	<i>11 PD</i>	<i>28.000</i>	
Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Kabupaten Pati	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	11 dokumen	38.000	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Kabupaten Pati	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	11 dokumen	28.000	

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	13 anak	30.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	13 anak	50.000	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Pati	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	13 anak	15.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Pati	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	13 anak	50.000	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kabupaten Pati	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	13 anak	15.000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kabupaten Pati	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	0	0	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	6 lembaga	30.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	6 lembaga	20.000	

Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	8 orang	15.000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Kabupaten Pati	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	0	0	
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kabupaten Pati	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	5 dokumen	15.000	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kabupaten Pati	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	5 dokumen	20.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				11.402.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				103.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase cakupan penyediaan informasi data keluarga	100%	380.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase cakupan penyediaan informasi data keluarga	100%	5.000	

			Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	35-39 tahun				Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	35-39 tahun		
			Angka keelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per seribu perempuan di kelompok umur yang sama	0,579				Angka keelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per seribu perempuan di kelompok umur yang sama	0,579		
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data kependudukan dan KB	21 laporan	380.000		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan dan KB	21 laporan	5.000	
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kabupaten Pati	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	6 dokumen	20.000		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	6 dokumen	5.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	21 laporan	20.000		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	0	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kabupaten Pati	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	31100 data	150.000		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	0	0	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Pati	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	63 dokumen	170.000		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	0	0	

Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kabupaten Pati	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	47 rumah	20.000	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kabupaten Pati	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	0	0	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	66,91%	5.849.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	66,91%	45.000	
<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>		<i>Jumlah advokasi Program Bangga Kencana dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	<i>11 laporan</i>	<i>1.962.000</i>	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>		<i>Jumlah advokasi Program Bangga Kencana dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	<i>11 laporan</i>	<i>25.000</i>	
Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	27 laporan	14.000	Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0	0	
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kabupaten Pati	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 unit	26.000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kabupaten Pati	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0	0	

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	21 laporan	870.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0	0	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	6 laporan	895.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	0	
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kabupaten Pati	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 dokumen	75.000	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kabupaten Pati	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0	0	

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Pati	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	6 dokumen	36.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Pati	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	0	0	
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kabupaten Pati	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15 organisasi	46.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kabupaten Pati	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15 organisasi	25.000	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah kader KB yang terlatih	406 kader	1.957.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah kader KB yang terlatih	0	0	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Pati	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	406 kader	1.957.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Pati	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	0	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang disalurkan	35218 alokon	926.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang disalurkan	35218 alokon	20.000	

		Kabupaten Pati	Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan	35218 dokumen			Kabupaten Pati	Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan	35218 dokumen		
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	58 laporan	45.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	58 laporan	20.000		
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	53755 orang	780.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Pati	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	0		
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Pati	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 dokumen	19.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Pati	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	0		
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Pati	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	5 unit	40.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Pati	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	0	0		
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 laporan	28.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	0		

	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kabupaten Pati	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	9638 orang	14.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kabupaten Pati	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	0	0	
	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB</i>		<i>Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif</i>	<i>58 kelompok</i>	<i>1.004.000</i>	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB</i>		<i>Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	4 laporan	14.000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	0	0	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten Pati	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	58 kampung	990.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten Pati	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase keluarga yang meningkat kesejahteraan keluarganya	60,25 %	5.173.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase keluarga yang meningkat kesejahteraan keluarganya	60,25%	53.000	

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah BKB, BKR, BKL yang terbina	127 organisasi	5.141.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah BKB, BKR, BKL yang terbina	127 organisasi	15.000	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Pati	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	127 unit	50.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Pati	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	0	0	
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 laporan	14.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	0	0	

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Pati	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1000 kader	5.050.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Pati	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0	0	
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kabupaten Pati	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	39 kelompok	27.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kabupaten Pati	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	39 kelompok	15.000	

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah pameran produk UPPKS dan jumlah peserta yang mengikuti pameran produk UPPKS	1 kali	32.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah pameran produk UPPKS dan jumlah peserta yang mengikuti pameran produk UPPKS	1 dokumen	38.000	
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Kabupaten Pati	Jumlah laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	4 laporan	10.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Kabupaten Pati	Jumlah laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	4 laporan	10.000	
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 laporan	22.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kabupaten Pati	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 laporan	28.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinsos P3AKB	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100 %	6.617.71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinsos P3AKB	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100%	4.879.305 ,5	
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	371.000	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	82.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	53.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	30.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	53.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	9.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	53.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	7.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	53.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	9.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	53.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	9.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 lapotan	53.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	9.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	53.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	9.000	
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100%	3.230.136	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100%	3.145.742	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos P3AKB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	3.057.136	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos P3AKB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	3.122.742	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	24.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dokumen	24.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	24.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	24.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	7.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	24.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	29.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	8.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	24.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	8.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinsos P3AKB	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	48.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinsos P3AKB	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.000	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	24.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2.000	

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	24.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	208.000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	85.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos P3AKB	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	57.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos P3AKB	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	30.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	19.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	2.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	19.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	3.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinsos P3AKB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	113.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinsos P3AKB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	50.000	
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	768.000	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	301.412,5	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinsos P3AKB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	29.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinsos P3AKB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos P3AKB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	35.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos P3AKB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos P3AKB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	140.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos P3AKB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	154.140,5	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinsos P3AKB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	45.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinsos P3AKB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	120.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.772	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 laporan	380.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 laporan	130.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	19.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinsos P3AKB	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	5.000	
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	301.000	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	117.314	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos P3AKB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	310.732	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos P3AKB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	78.000	
Pengadaan Mebel	Dinsos P3AKB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 paket	130.000	Pengadaan Mebel	Dinsos P3AKB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 paket	29.214	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	57.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	88.100	

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	57.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	57.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	1.047.000	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	896.100	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	27.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	2.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	130.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lapotan	132.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	55.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 lapotan	9.100	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	835.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos P3AKB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	753.000	
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	644.581	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Dinsos P3AKB	<i>Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	249.737	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos P3AKB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76 unit	200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos P3AKB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76 unit	99.737	
Pemeliharaan Mebel	Dinsos P3AKB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	100.000	Pemeliharaan Mebel	Dinsos P3AKB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	150.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	23.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	21.581	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos P3AKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	
				21.817.767					6.742.742	

2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Di dalam melaksanakan perencanaan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati juga melibatkan masyarakat untuk memberikan usulan. Adapun beberapa usulan dari masyarakat adalah sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pati

Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Sukolio	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Tertangani, Jumlah Anak Terlantar Yang Tertangani, Jumlah Lanjut Usia Terlantar Yang Tertangani, Jumlah Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Yang Tertangani	1 Paket	Alat Bantu Untuk Penyandang Cacat Dan Eks Trauma
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Desa Yang Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Margoyoso	Jumlah Desa Yang Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan	1 Paket	Terbatasnya Kemampuan Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pengobatan Yang Layak

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Margoyoso	Jumlah Desa Yang Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan	1 Paket	Terbatasnya Kemampuan Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pengobatan Yang Layak
		Juwana	Jumlah Desa Yang Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan	49 orang	Pelatihan Khusus PMKS
		Margorejo	Jumlah Desa Yang Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan	30 orang	Pelatihan Khusus PMKS
		Dukuhseti	Jumlah Desa Yang Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan	30 orang	Pelatihan Khusus PMKS
		Winong	Jumlah Desa Yang Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan	30 orang	Pelatihan Khusus PMKS
		Cluwak	Jumlah Desa Yang Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan	30 orang	Pelatihan Khusus PMKS
		Tlogowungu	Jumlah Desa Yang Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan	30 orang	Pelatihan Khusus PMKS
		Gembong	Jumlah Desa Yang Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan	30 orang	Pelatihan Khusus PMKS
		Batangan	Jumlah Desa Yang Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan	30 orang	Pelatihan Khusus PMKS
		Gunungwungkal	Jumlah Desa Yang Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan	30 orang	Pelatihan Khusus PMKS

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani		
	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jaken</i>	<i>Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah</i>	30 orang	Pelatihan keterampilan untuk perempuan
		<i>Cluwak</i>	<i>Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah</i>	30 orang	Pelatihan keterampilan untuk perempuan
		<i>Tlogowungu</i>	<i>Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah</i>	30 orang	Pelatihan keterampilan untuk perempuan
		<i>Gabus</i>	<i>Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah</i>	30 orang	Pelatihan keterampilan untuk perempuan
		<i>Dukuhseti</i>	<i>Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah</i>	30 orang	Pelatihan keterampilan untuk perempuan
		<i>Kayen</i>	<i>Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah</i>	30 orang	Pelatihan keterampilan untuk perempuan
		<i>Winong</i>	<i>Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah</i>	30 orang	Pelatihan keterampilan untuk perempuan
		<i>Pati</i>	<i>Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah</i>	30 orang	Pelatihan keterampilan untuk perempuan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Dengan Kementerian Sosial Dan Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dengan memastikan kehadiran Negara dalam menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat secara cepat, efektif dan bermartabat. Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa urusan sosial adalah urusan wajib dan pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah yang harus menjadi prioritas pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga Pemerintah Kabupaten Pati. Dalam hal kewenangan dalam penanganan PMKS maka Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi PMKS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati adalah penanganan langsung di luar Panti kecuali Eks Napza dan HIV/AIDs. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Provinsi terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna khususnya gelandang dan pengemis terlantar di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada taat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

Kebijakan Kementerian PPPA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Visi Kementerian PPPA tahun 2020-2024 yaitu: “Kementerian yang

PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO;
- b. Peningkatan perlindungan anak; dan
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sementara dalam rangka pencapaian sasaran ke-2 Provinsi Jawa Tengah, yaitu Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, berkarakter dan Adaptif, maka Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama tiga tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, antara lain:

- a. Meningkatkan kontribusi ekonomi perempuan;
- b. Menurunkan kekerasan terhadap perempuan;
- c. Meningkatkan perlindungan terhadap anak;
- d. Meningkatkan Keluarga berkualitas;

Tugas dan fungsi baik dari Kementerian PPPA dan dari Provinsi Jawa Tengah khususnya yang menangani PPPA diteruskan ke wilayah Kabupaten. Dalam hal ini, Kabupaten Pati menugaskan Dinas Sosial P3AKB untuk berkewajiban melaksanakan tugas urusan PPPA. Hal ini tertuang di Tujuan kedua Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Di

Daerah dan dengan sasaran Meningkatnya kesetaraan Serta Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

Kebijakan BKKBN Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut: “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian sasaran kedua yang diukur dengan indikator :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

Hal tersebut diatas selaras dengan Tujuan dan sasaran ketiga Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, yaitu Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan dengan dua sasaran Menurunnya angka kelahiran dan Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Disebutkan tiga tujuan jangka menengah pelayanan perangkat daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yaitu :

- 1 Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial

Tujuan ini mempunyai indikator Persentase Penurunan PMKS, dengan target awal Tahun 2025 5,81% dan target akhir Tahun 2026 sebesar 5,80%.

- 2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan di daerah

Pada tujuan kedua mempunyai indikator Indeks pemberdayaan perempuan (IDG) dengan target awal Tahun 2025 sebesar 69,15 dan pada target akhir Tahun 2026 sebesar 71,05.

3. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

Tujuan ketiga ini mempunyai indikator Persentase tingkat kesejahteraan keluarga dengan target awal Tahun 2025 sebesar 60,25 dan pada target akhir Tahun 2026 sebesar 60,50.

b. Sasaran

Selain tujuan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati juga terdapat beberapa sasaran, yaitu :

1. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Sasaran pertama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati yaitu Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan indikator persentase penurunan PMKS dengan target awal 5,81 dan di akhir Tahun 2026 sebesar 5,80.

2. Meningkatnya kesetaraan gender serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Sasaran kedua Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya kesetaraan gender serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan indikator (1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan target awal 2,1 dan di Tahun 2026 dengan target 2,2, indikator (2) Indeks Perlindungan Anak (IPA) di awal Tahun 2025 mentargetkan 77,93 dan di Tahun 2026 mentargetkan 79,83, indikator (3) Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO(per 100.000 penduduk perempuan) dengan target awal 0,000005 dan di target akhir 0,000005

3. Menurunnya angka kelahiran

Sasaran ketiga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati yaitu menurunnya angka kelahiran dengan indikator TFR (Angka Kelahiran Total) dimana target awal sebesar 1,66 dan target akhir sebesar 1,66

4. Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga

Sasaran keempat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati yaitu meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dengan target awal 60,25 dan target akhir sebesar 60,50

Perumusan tujuan dan sasaran Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2023-2026. Tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Persentase Penurunan PMKS	%	5.81
2		Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%	5.81
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Di Daerah		Indeks Pemberdayaan Perempuan	Angka	69.15
4		Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD;	%	2.1

5			Indeks Perlindungan Anak (IPA);	Angka	77.93
6			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Angka	0.000005
7	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk		Persentase Tingkat Kesejahteraan Keluarga	%	60.25
8		Menurunnya Angka Kelahiran	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1.66
9		Meningkatnya kualitas Pembangunan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga)	Angka	60.25

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi.

Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial P3AKB
Kabupaten Pati Tahun 2025

Tujuan/ Rencana Strategis PD		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Persentase Penurunan PMKS	Naiknya PMKS	12	Naiknya angka kemiskinan di DTKS	Kesejahteraan masyarakat menurun	Sosialisasi dan koordinasi dengan pengelola DTKS tingkat desa	Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati	TW. I, II, III, IV 2025
	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	Naiknya PMKS	12	Naiknya angka kemiskinan di DTKS	Kesejahteraan masyarakat menurun	Sosialisasi dan koordinasi dengan pengelola DTKS tingkat desa	Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati	TW. I, II, III, IV 2025
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Di Daerah		Indeks Pemberdayaan Perempuan	Menurunnya Pemberdayaan Perempuan	9	Ada kesenjangan kualitas SDM antara perempuan dan laki-laki	Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan	Sosialisasi dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan keterlibatan perempuan di dalam kegiatan	Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati	TW. I, II, III, IV 2025

	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD; Indeks Perlindungan Anak (IPA); Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Menurunnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	8	masih rendahnya pemahaman PD terkait perencanaan berbasis PUG	Pembangunan kurang berprioritas pada gender	Sosialisasi dan koordinasi dengan pihak - pihak terkait pengarusutamaan gender	Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati	TW. I, II, III, IV 2025
	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Tingkat Kesejahteraan Keluarga	Naiknya Jumlah Penduduk	6	Meningkatnya pernikahan dibawah umur dan keinginan untuk punya anak lagi	Kurangnya kesejahteraan keluarga yang baru menikah dibawah umur	Optimalisasi PIK-R dan Forum Genre	Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati	TW. I, II, III, IV 2025
	Menurunnya Angka Kelahiran	TFR (Angka Kelahiran Total)	Naiknya Angka Kelahiran	6	Kurangnya pengetahuan terhadap kegunaan dan manfaat alat dan obat kontrasepsi	Pasangan usia subur kurang mengontrol jarak kelahiran	Optimalisasi Petugas KB dan Kader KB	Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati	TW. I, II, III, IV 2025
	Meningkatnya kualitas Pembangunan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga)	Menurunnya Kualitas Pembangunan Keluarga	6	Banyaknya kepala keluarga yang bekerja merantau	Kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga	Optimalisasi kegiatan di kampung KB	Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati	TW. I, II, III, IV 2025

3.4 Proram dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Prioritas kegiatan program:

- a Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b Administrasi keuangan perangkat daerah
- c Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- d Administrasi umum perangkat daerah
- e Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- f Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- g Administrasi kepegawaian perangkat daerah

2. Program Pemberdayaan Sosial.

Prioritas kegiatan program:

- a. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten / kota.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Prioritas kegiatan program:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Prioritas kegiatan program:

- a. Pemeliharaan anak-anak terlantar;
- b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota.

5. Program Penanganan Bencana

Prioritas Kegiatan Program:

- a. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten /kota;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten / kota

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Prioritas Kegiatan Program:

- a. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Prioritas Kegiatan Program:

- a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten / kota;
- b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota.

8. Program Perlindungan perempuan:

Prioritas kegiatan program:

- a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten / kota;
- b. .Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota;
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota.

9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga:

Prioritas kegiatan program:

- a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten / kota

10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak:

Prioritas kegiatan program:

- a. Pengumpulan, pengelolaan analisis dan penyajian data gender dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten / kota.

11. Program Pemenuhan Hak Anak:

Prioritas kegiatan program:

- a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten / kota.

12. Program Perlindungan Khusus Anak:

Kegiatan program perlindungan khusus anak meliputi:

- a Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten / kota;
- b Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten /kota;
- c Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota.

13. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan program pengendalian penduduk meliputi :

- a Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten / kota dalam rangka prngendalian kkualitas penduduk;
- b Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten / kota.

14. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan program keluarga berencana meliputi :

- a Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local;
- b Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- c Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten / kota;

- d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

15. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Kegiatan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, meliputi:

- a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk Tahun 2025 ini pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Kabupaten Pati terdapat sebanyak 15 program, 32 kegiatan dan 62 sub kegiatan dengan total anggaran Rp.6.742.742.000,00 terdiri dari dana APBD sebesar Rp. 6.742.742.000,00 ,- dan dana DAK sebesar Rp,

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Rumusan Rencana Proram dan Kegiatan PD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Sesuai Dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati mengampu tiga urusan, yaitu : sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan dalam table berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12		
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6,356,742,000					9,499,746,000		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,879,305,500					6,313,136,000		
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						82,000,000					385,000,000		

1	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Dokumen	100 % 100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	55,000,000
1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	100 % 100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	55,000,000

1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberday aan Perempua n, Perlindung an Anak dan Keluarga Berenc ana	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tercapainya perencanaa n, penanggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tercapainya perencanaa n, penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kota/ Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	100 % 100 %	1 Dokume n	100 %	7,000,00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokume n	55,000,0 00
1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberday aan Perempua n, Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tercapainya perencanaa n, penanggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tercapainya perencanaa n, penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kota/ Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	100 % 100 %	1 Dokume n	100 %	9,000,00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokume n	55,000,0 00

1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tercapainya perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	100 % 100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	55,000,000
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Laporan	100 % 100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	55,000,000

1	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penangganan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	4 Laporan	100 % 100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	55,000,000
1	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,145,742,000				3,140,136,000

1	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi ya administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	30 Orang/bulan	100 % undefi ned undefi ned	3,122,74 2,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3,057,13 6,000
1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhi ya administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	100 % undefi ned undefi ned	7,000,00 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	26,000,0 00

1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terpenuhi ya administrasi keuangan perangkat daerah undefined	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Laporan	100 % undefined undefined	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	31,000,000
1	0	0	2.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terpenuhi ya administrasi keuangan perangkat daerah undefined	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Dokumen	100 % undefined undefined	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	26,000,000

1	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,000,000					26,000,000
1	0	0	2.0	000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhi ya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Semua Kota/ Kab. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 % 100 %	2 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	26,000,000
1	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							85,000,000					215,000,000

1	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhi ya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Paket	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60,000,000
1	0	0	2.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhi ya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	20,000,000

1	0	0	2.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terpenuhi ya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	20,000,000
1	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhi ya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	50 Orang	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	115,000,000

1	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah								303,040,000					763,000,000
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhi ya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Paket	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000

1	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhi ya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	5 Paket	100 %	156,218,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	160,000,000
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhi ya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Paket	100 %	5,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44,000,000

1	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terpenuhi ya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	2,772,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	124,000,000
1	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhi ya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	500 Laporan	100 %	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	385,000,000

1	0	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhi ya administrasi umum perangkat daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	20,000,000
1	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								111,183,000				310,000,000

		0 2	2.0 7	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terpenuhi ya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	3 Unit	100 %	78,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000
1	0 6	0 1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhi ya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	10 Unit	100 %	18,633,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	170,000,000

1	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhi ya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	100 % 100 %	5 Unit	100 %	14,550,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60,000,000
1	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								896,101,000				1,064,000,000

1	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberday aan Perempua n, Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhi ya penyediaan jasa penunjang pemerintah an daerah Terpenuhi ya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah undefined	Semua Kota/ Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	100 % 100 % undefi ned undefi ned	5 Laporan	100 % 100 % undefi ned undefi ned	2,001,00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	29,000,0 00
---	---	---	-----	-----	--------------------------------------	---	---	---	--	--	--------------	--	---------------	--	---	--------------	----------------

1	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberday aan Perempua n, Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana undefined	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhi ya penyediaan jasa penunjang pemerintah an daerah Terpenuhi ya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah undefined	Semua Kota/ Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	100 % 100 % undefi ned undefi ned	12 Laporan	100 % 100 % undefi ned undefi ned	132,000, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135,000, 000
---	---	---	-----	-----	---	--	---	---	--	--	---------------	--	-----------------	--	--	---------------	-----------------

1	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberday aan Perempua n, Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana undefined	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhi ya penyediaan jasa penunjang pemerintah an daerah Terpenuhi ya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah undefined	Semua Kota/ Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	100 % 100 % undefi ned undefi ned	5 Laporan	100 % 100 % undefi ned undefi ned	9,100,00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	60,000,0 00
---	---	---	-----	-----	---	--	---	---	--	--	--------------	--	---------------	--	--	--------------	----------------

1	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberday aan Perempua n, Perlindung an Anak dan Keluarga Berencana undefined	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhi ya penyediaan jasa penunjang pemerintah an daerah Terpenuhi ya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah undefined	Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	100 % 100 % undefi ned undefi ned	12 Laporan	100 % 100 % undefi ned undefi ned	753,000, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	840,000, 000	
1	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									254,239,500				410,000, 000

1	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhi ya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	76 Unit	100 %	104,319,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76 Unit	210,000,000
1	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhi ya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Unit	100 %	149,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000

1	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								300,000,000					610,000,000
1	0	0	2.0		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota													
1	0	0	2.0	000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang aktif melakukan pemutakhiran data PMKS	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial dan TKSK yang meningkatkan kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	176 Orang	96 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	176 Orang	610,000,000
1	0	0			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								923,000,000					2,343,300,000
1	0	0	2.0		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								923,000,000					2,343,300,000

1	0	0	2.0	000	Penyediaan Permakanan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, jumlah anak terlantar yang tertangani, jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, jumlah gelandangan pengemis di luar panti sosial yang tertangani	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.8 %	3500 Orang	47 orang	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3500 Orang	1,500,000,000
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Sandang	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, jumlah anak terlantar yang tertangani, jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, jumlah gelandangan pengemis di luar panti sosial yang tertangani	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.8 %	40 Orang	47 orang	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	6,655,000

1	0	0	2.0	000	Penyediaan Alat Bantu	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, jumlah anak terlantar yang tertangani, jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, jumlah gelandangan pengemis di luar panti sosial yang tertangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.8 %	225 Orang	47 orang	650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	746,645,000
1	0	0	2.0	000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, jumlah anak terlantar yang tertangani, jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, jumlah gelandangan pengemis di luar panti sosial yang tertangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.8 %	35 Orang	47 orang	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	67,000,000

1	0	0	2.0	000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, jumlah anak terlantar yang tertangani, jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, jumlah gelandangan pengemis di luar panti sosial yang tertangani	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.8 %	25 Orang	47 orang	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	25 Orang	23,000,000
1	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								76,000,000				70,310,000
1	0	0	2.0		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar												
1	0	0	2.0	000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	cakupan anak terlantar yang tertangani Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan terhadap anak terlantar yang ditangani	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	20 Orang	20 orang	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	13,310,000
1	0	0	2.0		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								71,000,000				57,000,000

1	0	0	2.0	000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan anak terlantar yang tertangani Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	40291 Keluarga	406 desa	41,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40291 Keluarga	40,000,000
1	0	0	2.0	000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	cakupan anak terlantar yang tertangani Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	45 Orang	406 desa	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	17,000,000
1	0	0			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								158,437,500				111,000,000
1	0	0	2.0		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								14,437,500				74,000,000

1	0	0	2.0	000	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan perlindungan bencana alam	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	15000 Orang	15000 orang	9,437,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	15000 Orang	37,000,000
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan perlindungan bencana alam	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	15000 Orang	15000 orang	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15000 Orang	37,000,000
1	0	0	2.0		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								144,000,000				37,000,000

1	0662	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Orang	5 kampung	144,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	37,000,000
1	067		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								19,999,000				52,000,000
1	0671	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								19,999,000				52,000,000
1	06711	2.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) yang terpelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 TMP	19,999,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52,000,000
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								283,000,000				280,000,000

2	0	0			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								62,528,000					87,000,000
2	0	0	2.0		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota													
2	0	0	2.0	000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Persentase OPD OPD yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan PPRG	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	39 Orang	39 OPD	31,543,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	39 Orang	11,000,000
2	0	0	2.0		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota													
2	0	0	2.0	000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase OPD OPD yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi masyarakat perempuan (bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi) yang mengikuti advokasi dan sosialisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	1 Dokumen	25 %	30,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	76,000,000
2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								20,472,000					39,000,000
2	0	0	2.0		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								4,140,000					9,000,000

2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 kali	4,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	9,000,000
2	0	0	2.0		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								16,332,000				30,000,000
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah kasus KDRT	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Orang	100 %	11,002,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	2 Orang	21,000,000

2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Layanan	100 %	5,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	9,000,000			
2	0	0	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								11,700,000					21,000,000		
2	0	0	8	4	2.0	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						11,700,000					21,000,000		
2	0	0	8	4	2.0	000	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan/pengaduan keluarga yang bermasalah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Dokumen	8 laporan	11,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	21,000,000
2	0	0	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								22,000,000						21,000,000	

208	001				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								22,000,000					21,000,000
208	001	2.000			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keterisian data gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah dokumen data gender dan anak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	25 Dokumen	25 dokumen	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	25 Dokumen	21,000,000
208	006				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								68,300,000					40,000,000
208	006	2.001			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								10,000,000					20,000,000
208	006	2.000			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah dan dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah lembaga pemerintah/ non pemerintah dan dunia usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan terkait PHA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	20 Organisasi	20 lembaga	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	20,000,000

2	0	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ kota								58,300,000					20,000,000
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah dan dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan dan pelayanan KIE	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	900 Orang	8 lembaga	58,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	20,000,000
2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								98,000,000					72,000,000
2	0	0	2.0		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								28,000,000					39,000,000
2	0	0	2.0	000	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	Jumlah OPD yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	11 Dokumen	11 OPD	28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	11 Dokumen	39,000,000
2	0	0	2.0		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								50,000,000					16,500,000

2	0	0	2.0	000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	13 Orang	13 orang	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	13 Orang	16,500,000
2	0	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								20,000,000				16,500,000
2	0	0	2.0	000	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	6 lembaga	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	5 Dokumen	16,500,000
2	1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								103,000,000				173,000,000
2	1	4	0		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								5,000,000				21,000,000
2	1	4	0	2.0	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								5,000,000				21,000,000

2	1	0	2.0	000	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Persentase cakupan penyediaan informasi data keluarga Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan dan KB	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 35-39 angka 0.579 angka	6 Dokumen	21 laporan	5,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	6 Dokumen	21,000,000
2	1	0	4	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								45,000,000				93,000,000
2	1	0	4	3	1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								25,000,000			45,000,000
2	1	0	4	3	1	2	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang										

2	1	0	2.0	001	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah advokasi Program Bangga Kencana dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	66,91 %	15 Organisasi	11 dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15 Organisasi	45,000,000
2	1	0	2.0		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								20,000,000				48,000,000
2	1	0	2.0	000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang disalurkan Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	66,91 %	58 Laporan	35218 alkon 35218 orang	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	58 Laporan	48,000,000
2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								53,000,000				59,000,000
2	1	0	2.0		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								15,000,000				30,000,000

2	1	0	2.0	002	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase keluarga yang meningkat kesejahteraan keluarganya	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk	Jumlah BKB, BKL, BKR yang terbina	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.25 %	39 Kelompok	127 kelompok	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk	39 Kelompok	30,000,000
2	1	0	2.0		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								38,000,000				29,000,000

2	1	0	2.0	000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase keluarga yang meningkatkan kesejahteraan keluarganya	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pameran produk UPPKS dan jumlah peserta yang mengikuti pameran produk UPPKS	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.25 %	4 Laporan	1 kali	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	9,000,000
2	1	0	2.0	000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase keluarga yang meningkatkan kesejahteraan keluarganya	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah pameran produk UPPKS dan jumlah peserta yang mengikuti pameran produk UPPKS	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.25 %	1 Laporan	1 kali	28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	20,000,000
TOTAL													6,742,742,000				9,952,746,000

4.2 Manajemen Risiko Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Manajemen risiko merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Dengan demikian, manajemen risiko diperlukan guna menghindari dan meminimalisir risiko yang akan muncul atau dihadapi di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan proses manajemen risiko merupakan program/kegiatan/sub kegiatan yang dinilai menjadi program/kegiatan/sub kegiatan yang memberikan kontribusi cukup besar pada ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah maupun pembangunan daerah.

Untuk level program dan kegiatan perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Sosial P3AKB
Tahun 2025

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesai an
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PEMBERDAY AAN SOSIAL	Persentase Kecamatan yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data PMKS	Data PMKS tidak mutakhir	12	Kelalaian operator DTKS dalam updating data	data kurang valid	Monev dan pelaporan data tiap bulannnya	Kepala Dinas Sosial P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Pekerja sosial dan TKSK yang meningkat kapasitasnya	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	12	1. tekanan dari pihak calon penerima bantuan sosial 2. kurangnya letegasan pihak desa dalam memilah calon penerima bansos santunan kematian	Adanya data calon penerima bansos yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan	1.Sosialisai ke pihak desa tentang ketentuan calon penerima bantuan sosial santunan kematian 2. Melakukan monev ke calon penerima bantuan sosial santunan kematian	Kepala Dinas SosialP3A KB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM REHABILITASI SI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Kebutuhan dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis tidak terpenuhi	12	Keterbatasan anggaran dan SDM	Tidak semua disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis tercukupi kebutuhannya	Berkoordinasi dengan Sentra Margolaras Pati dan Baznas	Kepala Dinas SosialP3A KB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, Jumlah anak terlantar yang tertangani, Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, Jumlah gelandangan pengemis di luar panti sosial yang tertangani	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	10	1. adanya usulan kembali calon penerima bantuan 2. kekurangtahuan petugas pengusul program bantuan sosial tentang calon penerima bantuan sosial	Adanya penerima manfaat yang belum tersentuh bantuan sosial	1. Sosialisasi dan monev 2. pengusulan aplikasi BANGDIPA (Bantuan PenyandangDisabi litas Pati) ke DISKOMINFO Kabupaten Pati	Kepala Dinas SosialP3A KB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PERLINDUN GAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Data kemiskinan desa tidak termutakhirkan	10	Kurangnya koordinasi Perangkat desa	terdampaknya data di kabupaten	Memberi peringatan kepada desa yang tidak melakukan updating data	Kepala Dinas SosialP3A KB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	12	1. Kenaikan biaya BPJS kesehatan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat yang mampu		monev ke calon penerima manfaat	Kepala Dinas SosialP3A KB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Kurangnya pemanfaatan PPRG	10	OPD kurang memahami tentang PPRG	Adanya ketimpangan gender	Pelatihan PPRG	Kepala Dinas SosialP3A KB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pelembagaan Pengarusuta maan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/K	Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan PPRG	Tidak tersusunya dokumen ARG	10	Tidak adanya pelatihan penyusunan dokumen ARG	Adanya ketimpangan gender dalam kegiatan	Sosialisasi tentang penyusunan ARG	Kepala Dinas SosialP3A KB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ota								
PROGRAM PERLINDUN GAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	Korban kekerasan meningkat	10	keuangan di dalam keluarga kurang	Korban kekerasan kepada perempuan	Upaya pencegahan dan pendampingan kasus	Kepala Dinas SosialP3A KB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah kasus KDRT	Tidak adanya layanan rujukan	10	Terbatasnya SDM	Kasus KDRT tidak terselesaikan	Optimalisasi pekesja sosial	Kepala Dinas SosialP3A KB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Adanya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi	10	Adanya pasangan yang ingin anak segera	Tidak terencananya jarak kelahiran	Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi	Kepala Dinas SosialP3A KB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan	Kurangnya alokon yang tersedia	10	tidak tersalurkannya alokon dengan baik	Masyarakat kurang mampu tidak dapat memanfaatkan alokon gratis	Bekerjasama dengan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pati	Kepala Dinas SosialP3A KB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Rencana kerja ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2025.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana ini, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi pada setiap triwulannya. Selanjutnya jika diperlukan dapat dilakukan perubahan Renja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2025 ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025. Diharapkan semua sumber daya Perangkat Daerah terkait dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja serta kinerja aparatur.

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

SUJARWANTO DWIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I

NIP.19670911 198607 1 001

Identifikasi Risiko

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

No.	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik
a	b	c	d	e	f	g
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Perencanaan	Terhambatnya urusan rutin PD	R.O.O.1	Dinas Sosial P3AKB
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	Laporan evaluasi tidak sesuai dengan target perencanaan	R.O.O.2	Dinas Sosial P3AKB
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Perencanaan	Terkendalnya administrasi keuangan PD	R.O.O.3	Dinas Sosial P3AKB
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perencanaan	Tidak tercatatnya administrasi barang	R.O.O.4	Dinas Sosial P3AKB
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan	Adanya administrasi pegawai yang kurang lengkap	R.O.O.5	Dinas Sosial P3AKB
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan	Terkendalnya rapat koordinasi luar daerah	R.O.O.6	Dinas Sosial P3AKB
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan	Kualitas barang pengadaan tidak sesuai spesifikasi	R.O.O.7	Dinas Sosial P3AKB

No.	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik
a	b	c	d	e	f	g
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan	Tidak terbayarnya gaji THL	R.O.O.8	Dinas Sosial P3AKB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan	Tidak terpeliharanya BMD dengan baik	R.O.O.9	Dinas Sosial P3AKB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kecamatan yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data PMKS	Perencanaan	Data PMKS tidak mutakhir	R.O.O.10	Dinas Sosial P3AKB
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja sosial dan TKSK yang meningkat kapasitasnya	Perencanaan	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	R.O.O.11	Dinas Sosial P3AKB
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Perencanaan	Kebutuhan dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis tidak terpenuhi	R.O.O.12	Dinas Sosial P3AKB
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, Jumlah anak terlantar yang tertangani, Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, Jumlah gelandangan pengemis di luar pengemis di luar panti sosial yang tertangani	Perencanaan	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	R.O.O.13	Dinas Sosial P3AKB
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Perencanaan	Data kemiskinan desa tidak termutakhirkan	R.O.O.14	Dinas Sosial P3AKB

No.	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik
a	b	c	d	e	f	g
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah pelayanan terhadap anak terlantar yang ditangani	Perencanaan	Tidak tertanganinya anak terlantar	R.O.O.15	Dinas Sosial P3AKB
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Perencanaan	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	R.O.O.16	Dinas Sosial P3AKB
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Perencanaan	Bencana datang kapanpun	R.O.O.17	Dinas Sosial P3AKB
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan perlindungan bencana alam	Perencanaan	Tidak tersalurkannya logistik untuk korban bencana	R.O.O.18	Dinas Sosial P3AKB
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	Perencanaan	Kurangnya pemahaman pengurus KSB terhadap kesiapsiagaan bencana	R.O.O.19	Dinas Sosial P3AKB
8	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	Perencanaan	Kurang terpeliharanya TMP	R.O.O.20	Dinas Sosial P3AKB
9	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	Perencanaan	Kurang terpeliharanya TMP	R.O.O.21	Dinas Sosial P3AKB
10	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Perencanaan	Kurangnya pemanfaatan PPRG	R.O.O.22	Dinas Sosial P3AKB

No.	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik
a	b	c	d	e	f	g
11	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan PPRG	Perencanaan	Tidak tersusunya dokumen ARG	R.O.O.23	Dinas Sosial P3AKB
12	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi masyarakat perempuan (bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi) yang mengikuti advokasi dan sosialisasi	Perencanaan	Tidak terlaksanakannya pelatihan bagi perempuan dalam mengelola usaha	R.O.O.24	Dinas Sosial P3AKB
13	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	Perencanaan	Korban kekerasan meningkat	R.O.O.25	Dinas Sosial P3AKB
14	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	Perencanaan	korban kekerasan perempuan tidak tertangani	R.O.O.26	Dinas Sosial P3AKB
15	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT	Perencanaan	Tidak adanya layanan rujukan	R.O.O.27	Dinas Sosial P3AKB
16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani	Perencanaan	Permasalahan keluarga tersebar	R.O.O.28	Dinas Sosial P3AKB

No.	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik
a	b	c	d	e	f	g
17	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah	Perencanaan	Maraknya pernikahan anak	R.O.O.29	Dinas Sosial P3AKB
18	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterisian data gender dan anak	Perencanaan	Kurangnya data gender dan anak	R.O.O.30	Dinas Sosial P3AKB
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	Perencanaan	Tidak tersedianya data gender	R.O.O.31	Dinas Sosial P3AKB
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	Perencanaan	Kurangnya dukungan dunia usaha	R.O.O.32	Dinas Sosial P3AKB
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan terkait PHA	Perencanaan	ketertelantaran forum anak	R.O.O.33	Dinas Sosial P3AKB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan dan pelayanan KIE	Perencanaan	Kurang optimalnya lembaga dalam pelayanan KIE	R.O.O.34	Dinas Sosial P3AKB

No.	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik
a	b	c	d	e	f	g
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Perencanaan	Kasus anak masih banyak terjadi	R.O.O.35	Dinas Sosial P3AKB
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Perencanaan	korban kekerasan anak tidak tertangani	R.O.O.36	Dinas Sosial P3AKB
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	Perencanaan	korban kekerasan anak tidak tertangani	R.O.O.37	Dinas Sosial P3AKB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	Perencanaan	Kurang tertanganinya anak yang memerlukan perlindungan	R.O.O.38	Dinas Sosial P3AKB
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase cakupan penyediaan informasi data keluarga	Perencanaan	Kurangnya informasi data keluarga	R.O.O.39	Dinas Sosial P3AKB
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data kependudukan dan KB	Perencanaan	kurangnya data kependudukan dan KB	R.O.O.40	Dinas Sosial P3AKB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Perencanaan	Adanya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi	R.O.O.41	Dinas Sosial

No.	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik
a	b	c	d	e	f	g
						P3AKB
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi Program Bangga Kencana dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Perencanaan	Kurang optimalnya KIE dalduk dan KB	R.O.O.42	Dinas Sosial P3AKB
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader KB yang terlatih	Perencanaan	Kurang maksimalnya peran Petugas KB	R.O.O.43	Dinas Sosial P3AKB
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan	Perencanaan	Kurangnya alokon yang tersedia	R.O.O.44	Dinas Sosial P3AKB
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Perencanaan	Kurang optimalnya kelompok kerja	R.O.O.45	Dinas Sosial P3AKB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang meningkat kesejahteraan keluarganya	Perencanaan	Penurunan keluarga sejahtera	R.O.O.46	Dinas Sosial P3AKB

No.	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik
a	b	c	d	e	f	g
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah BKB, BKR, BKL yang terbina	Perencanaan	Kurang optimalnya pembinaan tribina	R.O.O.47	Dinas Sosial P3AKB
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pameran produk UPPKS dan jumlah peserta yang mengikuti pameran produk UPPKS	Perencanaan	Kurang maksimalnya pameran UPPKS	R.O.O.48	Dinas Sosial P3AKB

Analisis Risiko.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Perencanaan	Terhambatnya urusan rutin PD	R.O.O. 1	Dinas Sosial P3AK B	Perencanaan dan kegiatan tidak sesuai	Internal	C	Kegiatan menjadi terhambat	Dinas Sosial P3AKB
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	Laporan evaluasi tidak sesuai dengan target perencanaan	R.O.O. 2	Dinas Sosial P3AK B	Adanya perubahan peraturan dan kebijaksanaan	Internal	C	Kegiatan tidak dapat maksimal	Dinas Sosial P3AKB
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Perencanaan	Terkendalnya administrasi keuangan PD	R.O.O. 3	Dinas Sosial P3AK B	Aplikasi SIPD tidak lancar	Internal	C	Pencairan keuangan tidak tepat waktu	Dinas Sosial P3AKB
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada	Perencanaan	Tidak tercatatnya administrasi barang	R.O.O. 4	Dinas Sosial P3AK B	Pencatatan kurang teliti	Internal	C	Tidak teranggaranya pemeliharaan barang	Dinas Sosial P3AKB

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Perangkat Daerah									
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perencanaan	Adanya administrasi pegawai yang kurang lengkap	R.O.O. 5	Dinas Sosial P3AK B	Pegawai tidak tepat waktu dalam melengkapi administrasi	Internal	C	Terlambatnya pegawai dalam mengurus administrasi	Dinas Sosial P3AKB
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan	Terkendalanya rapat koordinasi luar daerah	R.O.O. 6	Dinas Sosial P3AK B	Prediksi rapat koordinasi luar daerah lebih banyak dari perencanaan	Internal	C	Tidak terlaksananya rapat koordinasi luar daerah	Dinas Sosial P3AKB
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan	Kualitas barang pengadaan tidak sesuai spesifikasi	R.O.O. 7	Dinas Sosial P3AK B	Tanggung jawab penyedia kurang	Internal	C	Barang cepat rusak / pemakaian kurang maksimal	Dinas Sosial P3AKB

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiny a Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Perencana an	Tidak terbayarnya gaji THL	R.O.O. 8	Dinas Sosial P3AK B	Tidak terhitungnya kebutuhan dengan baik	Internal	C	Pekerjaan kantor yang dikerjakan THL terkendalan	Dinas Sosial P3AKB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiny a Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Perencana an	Tidak terpeliharanya BMD dengan baik	R.O.O. 9	Dinas Sosial P3AK B	Usia BMD sudah tua	Internal	C	Aktifitas penggunaan BMD tidak maksimal	Dinas Sosial P3AKB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kecamatan yang Aktif Melakukan Pemutakhira n Data PMKS	Perencana an	Data PMKS tidak mutakhir	R.O.O. 10	Dinas Sosial P3AK B	Kelalaian operator DTKS dalam updating data	Ekstern al	C	data kurang valid	Masyara kat Kabupate n Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja sosial dan TKSK yang meningkat kapasitasnya	Perencana an	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	R.O.O. 11	Dinas Sosial P3AK B	1. tekanan dari pihak calon penerima bantuan sosial 2. kurangnya letegasan pihak desa dalam memilah calon penerima bansos santunan kematian	Ekstern al	C	Adanya data calon penerima bansos yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan	Masyara kat Kabupate n Pati
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	Perencana an	Kebutuhan dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis tidak terpenuhi	R.O.O. 12	Dinas Sosial P3AK B	Keterbatasan anggaran dan SDM	Ekstern al	C	Tidak semua disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis tercukupi kebutuhanny a	Masyara kat Kabupate n Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		luar panti (indikator SPM)									
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, Jumlah anak terlantar yang tertangani, Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, Jumlah gelandangan pengemis di luar pengemis di luar panti sosial yang	Perencana an	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	R.O.O. 13	Dinas Sosial P3AK B	1. adanya usulan kembali calon penerima bantuan 2. kekurangtah uan petugas pengusul program bantuan sosial tentang calon penerima bantuan sosial	Ekstern al	C	Adanya penerima manfaat yang belum tersentuh bantuan sosial	Masyara kat Kabupate n Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		tertangani									
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Perencana an	Data kemiskinan desa tidak termutakhirka n	R.O.O. 14	Dinas Sosial P3AK B	Kurangnya koordinasi Perangkat desa	Ekstern al	C	terdampakny a data di kabupaten	Masyara kat Kabupate n Pati
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah pelayanan terhadap anak terlantar yang ditangani	Perencana an	Tidak tertanganinya anak terlantar	R.O.O. 15	Dinas Sosial P3AK B	Sosialisasi dan pergaulan anak	Ekstern al	C	Semakin maraknnya anak jalanan	Masyara kat Kabupate n Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Perencanaan	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	R.O.O. 16	Dinas Sosial P3AK B	1. Kenaikan biaya BPJS kesehatan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat yang mampu	Eksternal	C		Masyarakat Kabupaten Pati
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Perencanaan	Bencana datang kapanpun	R.O.O. 17	Dinas Sosial P3AK B	tidak adanya laporan	Eksternal	C	Korban bencana tidak dapat bantuan	Masyarakat Kabupaten Pati
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan perlindungan bencana alam	Perencanaan	Tidak tersalurkannya logistik untuk korban bencana	R.O.O. 18	Dinas Sosial P3AK B	Kurangnya persiapan dan atau akses bencana yang sulit dijangkau	Eksternal	C	Logistik menumpuk dan tidak layak	Masyarakat Kabupaten Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	Perencanaan	Kurangnya pemahaman pengurus KSB terhadap kesiapsiagaan bencana	R.O.O. 19	Dinas Sosial P3AK B	Terbatasnya materi sosialisasi	Eksternal	C	Kurangnya keahlian ketika terjadi bencana	Masyarakat Kabupaten Pati
8	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	Perencanaan	Kurang terpeliharanya TMP	R.O.O. 20	Dinas Sosial P3AK B	Bangunan sudah tua dan cuaca	Eksternal	C	Bangunan tidak dapat dimanfaatkan	Masyarakat Kabupaten Pati
9	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	Perencanaan	Kurang terpeliharanya TMP	R.O.O. 21	Dinas Sosial P3AK B	Bangunan sudah tua dan cuaca	Eksternal	C	Bangunan tidak dapat dimanfaatkan	Masyarakat Kabupaten Pati
10	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Perencanaan	Kurangnya pemanfaatan PPRG	R.O.O. 22	Dinas Sosial P3AK B	OPD kurang memahami tentang PPRG	Eksternal	C	Adanya ketimpangan gender	Masyarakat Kabupaten Pati
11	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan PPRG	Perencanaan	Tidak tersusunya dokumen ARG	R.O.O. 23	Dinas Sosial P3AK B	Tidak adanya pelatihan penyusunan dokumen ARG	Eksternal	C	Adanya ketimpangan gender dalam kegiatan	Masyarakat Kabupaten Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Kabupaten/Kota										
12	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi masyarakat perempuan (bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi) yang mengikuti advokasi dan sosialisasi	Perencanaan	Tidak terlaksanakannya pelatihan bagi perempuan dalam mengelola usaha	R.O.O. 24	Dinas Sosial P3AK B	Banyaknya perempuan yang sudah menikah fokus pada rumah tangga	Eksternal	C	Menurunnya pemberdayaan perempuan dalam segala sektor	Masyarakat Kabupaten Pati
13	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	Perencanaan	Korban kekerasan meningkat	R.O.O. 25	Dinas Sosial P3AK B	keuangan di dalam keluarga kurang	Eksternal	C	Korban kekerasan kepada perempuan	Masyarakat Kabupaten Pati
14	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang	Perencanaan	korban kekerasan perempuan tidak tertangani	R.O.O. 26	Dinas Sosial P3AK B	kurangnya persiapan dan terbatasnya SDM	Eksternal	C	Korban kekerasan menjadi trauma	Masyarakat Kabupaten Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		dilaksanakan									
15	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT	Perencanaan	Tidak adanya layanan rujukan	R.O.O. 27	Dinas Sosial P3AK B	Terbatasnya SDM	Eksternal	C	Kasus KDRT tidak terselesaikan	Masyarakat Kabupaten Pati
16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani	Perencanaan	Permasalahan keluarga tersebar	R.O.O. 28	Dinas Sosial P3AK B	Adanya pihak yang menyebar permasalahan keluarga	Eksternal	C	Adanya tidak kepercayaan	Masyarakat Kabupaten Pati
17	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan/pengaduan keluarga yang bermasalah	Perencanaan	Maraknya pernikahan anak	R.O.O. 29	Dinas Sosial P3AK B	Ketidaktahuannya risiko nikah muda	Eksternal	C	Perkawinan kurang harmonis	Masyarakat Kabupaten Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
18	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterisian data gender dan anak	Perencanaan	Kurangnya data gender dan anak	R.O.O. 30	Dinas Sosial P3AK B	OPD terkait belum maksimal tentang keterisian data gender dan anak	Eksternal	C	Perencanaan dan kegiatan kurang memilah gender	Masyarakat Kabupaten Pati
19	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	Perencanaan	Tidak tersedianya data gender	R.O.O. 31	Dinas Sosial P3AK B	Kurangnya dokumen tentang data terpilah gender	Eksternal	C	data gender kurang lengkap	Masyarakat Kabupaten Pati
20	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	Perencanaan	Kurangnya dukungan dunia usaha	R.O.O. 32	Dinas Sosial P3AK B	Kurangnya keterlibatan dunia usaha	Eksternal	C	Hak anak tidak terpenuhi secara maksimal	Masyarakat Kabupaten Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
21	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampinga n terkait PHA	Perencana an	ketertelantara n forum anak	R.O.O. 33	Dinas Sosial P3AK B	Kurangnya keterlibatan anak	Ekstern al	C	Kurang maksimalnya forum anak	Masyara kat Kabupate n Pati
22	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan dan pelayanan KIE	Perencana an	Kurang optimalnya lembaga dalam pelayanan KIE	R.O.O. 34	Dinas Sosial P3AK B	Lembaga Perlindungan anak masih sedikit	Ekstern al	C	KIE kurang maksimal	Masyara kat Kabupate n Pati
23	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Perencana an	Kasus anak masih banyak terjadi	R.O.O. 35	Dinas Sosial P3AK B	Kurangnya pendampinga n anak	Ekstern al	C	Adanya korban kekerasan anak	Masyara kat Kabupate n Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
24	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Perencanaan	korban kekerasan anak tidak tertangani	R.O.O. 36	Dinas Sosial P3AK B	kurangnya persiapan dan terbatasnya SDM	Eksternal	C	Adanya kasus pembulian	Masyarakat Kabupaten Pati
25	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	Perencanaan	korban kekerasan anak tidak tertangani	R.O.O. 37	Dinas Sosial P3AK B	kurangnya persiapan dan terbatasnya SDM	Eksternal	C	Trauma terhadap anak	Masyarakat Kabupaten Pati
26	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	Perencanaan	Kurang tertanganinya anak yang memerlukan perlindungan	R.O.O. 38	Dinas Sosial P3AK B	Terbatasnya SDM	Eksternal	C	Kurang maksimalnya perlindungan anak	Masyarakat Kabupaten Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
27	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase cakupan penyediaan informasi data keluarga	Perencanaan	Kurangnya informasi data keluarga	R.O.O. 39	Dinas Sosial P3AK B	data tidak terisikan	Eksternal	C	data tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan	Masyara kat Kabupate n Pati
28	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data kependudukan dan KB	Perencanaan	kurangnya data kependudukan dan KB	R.O.O. 40	Dinas Sosial P3AK B	Data kependudukan dan KB kurang lengkap	Eksternal	C	data tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan	Masyara kat Kabupate n Pati
29	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Perencanaan	Adanya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi	R.O.O. 41	Dinas Sosial P3AK B	Adanya pasangan yang ingin anak segera	Eksternal	C	Tidak terencananya jarak kelahiran	Masyara kat Kabupate n Pati
30	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi Program Bangga Kencana dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Perencanaan	Kurang optimalnya KIE dalduk dan KB	R.O.O. 42	Dinas Sosial P3AK B	Kurang menariknya media KIE	Eksternal	C	Kurangnya pengetahuan tentang KB	Masyara kat Kabupate n Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
31	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader KB yang terlatih	Perencanaan	Kurang maksimalnya peran Petugas KB	R.O.O. 43	Dinas Sosial P3AK B	Petugas KB banyak yang pensiun	Eksternal	C	Petugas KB yang tersedia kurangnya signifikan dengan daerah binaan	Masyarakat Kabupaten Pati
32	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan	Perencanaan	Kurangnya alokon yang tersedia	R.O.O. 44	Dinas Sosial P3AK B	tidak tersalurkannya alokon dengan baik	Eksternal	C	Masyarakat kurang mampu tidak dapat memanfaatkan alokon gratis	Masyarakat Kabupaten Pati
33	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Perencanaan	Kurang optimalnya kelompok kerja	R.O.O. 45	Dinas Sosial P3AK B	Banyaknya kelompok kerja yang tidak aktif	Eksternal	C	Anggota kelompok kerja tidak aktif	Masyarakat Kabupaten Pati

No .	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemili k	Uraian	Sumbe r		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang meningkat kesejahteraan keluarganya	Perencana an	Penurunan keluarga sejahtera	R.O.O. 46	Dinas Sosial P3AK B	Permasalahan n keluarga meningkat	Ekstern al	C	Keluarga kurang harmonis	Masyara kat Kabupate n Pati
35	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah BKB, BKR, BKL yang terbina	Perencana an	Kurango ptimalnya pembinaan tribina	R.O.O. 47	Dinas Sosial P3AK B	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan tribina	Ekstern al	C	Tidak tersalurkann ya pengetahuan kepada masyarakat lewat tribina dengan baik	Masyara kat Kabupate n Pati
36	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pameran produk UPPKS dan jumlah peserta yang mengikuti pameran produk UPPKS	Perencana an	Kurang maksimalnya pameran UPPKS	R.O.O. 48	Dinas Sosial P3AK B	Produk UPPKS kurang bervariasi	Ekstern al	C	Kurang lakunya produk	Masyara kat Kabupate n Pati

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Terhambatnya urusan rutin PD	4	Perencanaan dan kegiatan tidak sesuai	Kegiatan menjadi terhambat
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi tidak sesuai dengan target perencanaan	3	Adanya perubahan peraturan dan kebijaksanaan	Kegiatan tidak dapat maksimal
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Terkendalnya administrasi keuangan PD	3	Aplikasi SIPD tidak lancar	Pencairan keuangan tidak tepat waktu
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tidak tercatatnya administrasi barang	2	Pencatatan kurang teliti	Tidak terangarkannya pemeliharaan barang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Adanya administrasi pegawai yang kurang lengkap	4	Pegawai tidak tepat waktu dalam melengkapi administrasi	Terlambatnya pegawai dalam mengurus administrasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkendalnya rapat koordinasi luar daerah	3	Prediksi rapat koordinasi luar daerah lebih banyak dari perencanaan	Tidak terlaksananya rapat koordinasi luar daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas barang pengadaan tidak sesuai spesifikasi	4	Tanggung jawab penyedia kurang	Barang cepat rusak / pemakaian kurang maksimal

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tidak terbayarnya gaji THL	5	Tidak terhitungnya kebutuhan dengan baik	Pekerjaan kantor yang dikerjakan THL terkendalan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tidak terpeliharanya BMD dengan baik	5	Usia BMD sudah tua	Aktifitas penggunaan BMD tidak maksimal
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kecamatan yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data PMKS	Data PMKS tidak mutakhir	12	Kelalaian operator DTKS dalam updating data	data kurang valid
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja sosial dan TKSK yang meningkat kapasitasnya	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	12	1. tekanan dari pihak calon penerima bantuan sosial 2. kurangnya letegasan pihak desa dalam memilah calon penerima bansos santunan kematian	Adanya data calon penerima bansos yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Kebutuhan dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis tidak terpenuhi	12	Keterbatasan anggaran dan SDM	Tidak semua disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis tercukupi kebutuhannya

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5	6
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, Jumlah anak terlantar yang tertangani, Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, Jumlah gelandangan pengemis di luar pengemis di luar panti sosial yang tertangani	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	10	1. adanya usulan kembali calon penerima bantuan 2. kekurangtahuan petugas pengusul program bantuan sosial tentang calon penerima bantuan sosial	Adanya penerima manfaat yang belum tersentuh bantuan sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Data kemiskinan desa tidak termutakhirkan	10	Kurangnya koordinasi Perangkat desa	terdampaknya data di kabupaten
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah pelayanan terhadap anak terlantar yang ditangani	Tidak tertanganinya anak terlantar	12	Sosialisasi dan pergaulan anak	Semakin marakannya anak jalanan
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	12	1. Kenaikan biaya BPJS kesehatan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat yang mampu	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Bencana datang kapanpun	9	tidak adanya laporan	Korban bencana tidak dapat bantuan
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan perlindungan bencana alam	Tidak tersalurkannya logistik untuk korban bencana	4	Kurangnya persiapan dan atau akses bencana yang sulit dijangkau	Logistik menumpuk dan tidak layak

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5	6
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	Kurangnya pemahaman pengurus KSB terhadap kesiapsiagaan bencana	6	Terbatasnya materi sosialisasi	Kurangnya keahlian ketika terjadi bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	Kurang terpeliharanya TMP	9	Bangunan sudah tua dan cuaca	Bangunan tidak dapat dimanfaatkan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	Kurang terpeliharanya TMP	9	Bangunan sudah tua dan cuaca	Bangunan tidak dapat dimanfaatkan
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Kurangnya pemanfaatan PPRG	10	OPD kurang memahami tentang PPRG	Adanya ketimpangan gender
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan PPRG	Tidak tersusunya dokumen ARG	10	Tidak adanya pelatihan penyusunan dokumen ARG	Adanya ketimpangan gender dalam kegiatan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi masyarakat perempuan (bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi) yang mengikuti advokasi dan sosialisasi	Tidak terlaksanakannya pelatihan bagi perempuan dalam mengelola usaha	9	Banyaknya perempuan yang sudah menikah fokus pada rumah tangga	Menurunnya pemberdayaan perempuan dalam segala sektor
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	Korban kekerasan meningkat	9	keuangan di dalam keluarga kurang	Korban kekerasan kepada perempuan
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	korban kekerasan perempuan tidak tertangani	9	kurangnya persiapan dan terbatasnya SDM	Korban kekerasan menjadi trauma

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT	Tidak adanya layanan rujukan	10	Terbatasnya SDM	Kasus KDRT tidak terselesaikan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani	Permasalahan keluarga tersebar	8	Adanya pihak yang menyebar permasalahan keluarga	Adanya tidak kepercayaan
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah	Maraknya pernikahan anak	8	Ketidaktahuan risiko nikah muda	Perkawinan kurang harmonis
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterisian data gender dan anak	Kurangnya data gender dan anak	6	OPD terkait belum maksimal tentang keterisian data gender dan anak	Perencanaan dan kegiatan kurang memilah gender
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	Tidak tersedianya data gender	6	Kurangnya dokumen tentang data terpilah gender	data gender kurang lengkap
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	Kurangnya dukungan dunia usaha	8	Kurangnya keterlibatan dunia usaha	Hak anak tidak terpenuhi secara maksimal
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan terkait PHA	ketertelantaran forum anak	8	Kurangnya keterlibatan anak	Kurang maksimalnya forum anak

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5	6
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan dan pelayanan KIE	Kurang optimalnya lembaga dalam pelayanan KIE	8	Lembaga Perlindungan anak masih sedikit	KIE kurang maksimal
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Kasus anak masih banyak terjadi	8	Kurangnya pendampingan anak	Adanya korban kekerasan anak
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	korban kekerasan anak tidak tertangani	9	kurangnya persiapan dan terbatasnya SDM	Adanya kasus pembulhan
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	korban kekerasan anak tidak tertangani	8	kurangnya persiapan dan terbatasnya SDM	Trauma terhadap anak
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	Kurang tertanganinya anak yang memerlukan perlindungan	9	Terbatasnya SDM	Kurang maksimalnya perlindungan anak
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase cakupan penyediaan informasi data keluarga	Kurangnya informasi data keluarga	6	data tidak terisikan	data tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data kependudukan dan KB	kurangnya data kependudukan dan KB	6	Data kependudukan dan KB kurang lengkap	data tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet	Adanya kebutuhan KB yang tidak	6	Adanya pasangan yang ingin anak	Tidak terencananya jarak kelahiran

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5	6
	need)	terpenuhi		segera	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi Program Bangga Kencana dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Kurang optimalnya KIE dalduk dan KB	6	Kurang menariknya media KIE	Kurangnya pengetahuan tentang KB
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader KB yang terlatih	Kurang maksimalnya peran Petugas KB	9	Petugas KB banyak yang pensiun	Petugas KB yang tersedia kurangnya signifikan dengan daerah binaan
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan	Kurangnya alokasi yang tersedia	10	tidak tersalurkannya alokasi dengan baik	Masyarakat kurang mampu tidak dapat memanfaatkan alokasi gratis
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kurang optimalnya kelompok kerja	9	Banyaknya kelompok kerja yang tidak aktif	Anggota kelompok kerja tidak aktif
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang meningkat kesejahteraan keluarganya	Penurunan keluarga sejahtera	6	Permasalahan keluarga meningkat	Keluarga kurang harmonis
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah BKB, BKR, BKL yang terbina	Kurang optimalnya pembinaan terbina	4	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan terbina	Tidak tersalurkannya pengetahuan kepada masyarakat lewat terbina

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5	6
					dengan baik
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pameran produk UPPKS dan jumlah peserta yang mengikuti pameran produk UPPKS	Kurang maksimalnya pameran UPPKS	9	Produk UPPKS kurang bervariasi	Kurang lakunya produk

Penetapan Risiko Prioritas.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Terhambatnya urusan rutin PD	4	Perencanaan dan kegiatan tidak sesuai	Kegiatan menjadi terhambat	Menyusun perencanaan sebaik mungkin	Kepala Dinas Sosial P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi tidak sesuai dengan target perencanaan	3	Adanya perubahan peraturan dan kebijaksanaan	Kegiatan tidak dapat maksimal	Mengadakan rakor internal	Kepala Dinas Sosial P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Terkendalnya administrasi keuangan PD	3	Aplikasi SIPD tidak lancar	Pencairan keuangan tidak tepat waktu	Pengadaan komputer baru yang spesifikasi mendukung	Kepala Dinas Sosial P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tidak tercatatnya administrasi barang	2	Pencatatan kurang teliti	Tidak terangrarkannya a pemeliharaan barang	melaporkan administrasi barang tepat waktu	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Adanya administrasi pegawai yang kurang lengkap	4	Pegawai tidak tepat waktu dalam melengkapi administrasi	Terlambatnya pegawai dalam mengurus administrasi	melaporkan pegawai yang terlambat dalam pemenuhan administrasi	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkendalanya rapat koordinasi luar daerah	3	Prediksi rapat koordinasi luar daerah lebih banyak dari perencanaan	Tidak terlaksananya rapat koordinasi luar daerah	Memastikan semua surat tercatat	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas barang pengadaan tidak sesuai spesifikasi	4	Tanggung jawab penyedia kurang	Barang cepat rusak / pemakaian kurang maksimal	Koordinasi dengan penyedia	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tidak terbayarnya gaji THL	5	Tidak terhitungnya kebutuhan dengan baik	Pekerjaan kantor yang dikerjakan THL terkendalan	Optimalisasi kontrak kerja	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tidak terpeliharanya BMD dengan baik	5	Usia BMD sudah tua	Aktifitas penggunaan BMD tidak maksimal	Mengusulkan penghapusan dan peremajaan BMD	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kecamatan yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data PMKS	Data PMKS tidak mutakhir	12	Kelalaian operator DTKS dalam updating data	data kurang valid	Monev dan pelaporan data tiap bulannnya	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja sosial dan TKSK yang meningkat kapasitasnya	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	12	1. tekanan dari pihak calon penerima bantuan sosial 2. kurangnya letegasan pihak desa dalam memilah calon penerima bansos santunan kematian	Adanya data calon penerima bansos yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan	1.Sosialisai ke pihak desa tentang ketentuan calon penerima bantuan sosial santunan kematian 2. Melakukan monev ke calon penerima bantuan sosial santunan kematia	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Kebutuhan dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis tidak terpenuhi	12	Keterbatasan anggaran dan SDM	Tidak semua disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis tercukupi kebutuhannya	Berkoordinasi dengan Sentra Margolaras Pati dan Baznas	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, Jumlah anak terlantar yang tertangani, Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, Jumlah gelandangan pengemis di luar pengemis di luar panti sosial yang tertangani	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	10	1. adanya usulan kembali calon penerima bantuan 2. kekurangan petugas pengusul program bantuan sosial tentang calon penerima bantuan sosial	Adanya penerima manfaat yang belum tersentuh bantuan sosial	1. Sosialisasi dan monev 2. pengusulan aplikasi BANGDIPA (Bantuan Penyandang Disabilitas Pati) ke DISKOMINFO Kabupaten Pati	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Data kemiskinan desa tidak termutakhirkan	10	Kurangnya koordinasi Perangkat desa	terdampaknya data di kabupaten	Memberi peringatan kepada desa yang tidak melakukan updating data	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Jumlah pelayanan terhadap anak terlantar yang ditangani	Tidak tertanganinya anak terlantar	12	Sosialisasi dan pergaulan anak	Semakin maraknnya anak jalanan	Kerjasama dengan pihak terkait	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sosial	12	1. Kenaikan biaya BPJS kesehatan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat yang mampu		monev ke calon penerima manfaat	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Bencana datang kapanpun	9	tidak adanya laporan	Korban bencana tidak dapat bantuan	Optimalisasi Tagana	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan perlindungan bencana alam	Tidak tersalurkannya logistik untuk korban bencana	4	Kurangnya persiapan dan akses bencana yang sulit dijangkau	Logistik menumpuk dan tidak layak	monev ke korban bencana	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	Kurangnya pemahaman pengurus KSB terhadap kesiapsiagaan bencana	6	Terbatasnya materi sosialisasi	Kurangnya keahlian ketika terjadi bencana	Kerjasama dengan kementerian terkait	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	Kurang terpeliharanya TMP	9	Bangunan sudah tua dan cuaca	Bangunan tidak dapat dimanfaatkan	menganggarkan pemeliharaan TMP	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	Kurang terpeliharanya TMP	9	Bangunan sudah tua dan cuaca	Bangunan tidak dapat dimanfaatkan	menganggarkan pemeliharaan TMP	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Kurangnya pemanfaatan PPRG	10	OPD kurang memahami tentang PPRG	Adanya ketimpangan gender	Pelatihan PPRG	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan PPRG	Tidak tersusunya dokumen ARG	10	Tidak adanya pelatihan penyusunan dokumen ARG	Adanya ketimpangan gender dalam kegiatan	Sosialisasi tentang penyusunan ARG	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi masyarakat perempuan (bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi) yang mengikuti advokasi dan sosialisasi	Tidak terlaksanakannya pelatihan bagi perempuan dalam mengelola usaha	9	Banyaknya perempuan yang sudah menikah fokus pada rumah tangga	Menurunnya pemberdayaan perempuan dalam segala sektor	Melakukan kegiatan pelatihan kepada perempuan	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	Korban kekerasan meningkat	9	keuangan di dalam keluarga kurang	Korban kekerasan kepada perempuan	Upaya pencegahan dan pendampingan kasus	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	korban kekerasan perempuan tidak tertangani	9	kurangnya persiapan dan terbatasnya SDM	Korban kekerasan menjadi trauma	Kerjasama dengan aparatur desa dan calon pelatih	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT	Tidak adanya layanan rujukan	10	Terbatasnya SDM	Kasus KDRT tidak terselesaikan	Optimalisasi pekesja sosial	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani	Permasalahan keluarga tersebar	8	Adanya pihak yang menyebar permasalahan keluarga	Adanya tidak kepercayaan	Memberikan rasa kepercayaan dan kenyamanan serta menjaga kerahasiaan kepada pelapor	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan/pengaduan keluarga yang bermasalah	Maraknya pernikahan anak	8	Ketidaktahuan risiko nikah muda	Perkawinan kurang harmonis	Sosialisasi tentang bahaya nikah usia anak	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterisian data gender dan anak	Kurangnya data gender dan anak	6	OPD terkait belum maksimal tentang keterisian data gender dan anak	Perencanaan dan kegiatan kurang memilah gender	Melakukan koordinasi dengan PD terkait	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	Tidak tersedianya data gender	6	Kurangnya dokumen tentang data terpilah gender	data gender kurang lengkap	membuat laporan tentang data terpilah gender	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	Kurangnya dukungan dunia usaha	8	Kurangnya keterlibatan dunia usaha	Hak anak tidak terpenuhi secara maksimal	Kerjasama dengan dunia usaha	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan terkait PHA	ketertelantaran forum anak	8	Kurangnya keterlibatan anak	Kurang maksimalnya forum anak	Optimalisasi forum anak	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan dan pelayanan	Kurang optimalnya lembaga dalam pelayanan KIE	8	Lembaga Perlindungan anak masih sedikit	KIE kurang maksimal	Optimalisasi dengan lembaga perlindungan anak	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KIE							
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Kasus anak masih banyak terjadi	8	Kurangnya pendampingan anak	Adanya korban kekerasan anak	Koordinasi dengan sekolah dan pesantren	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	korban kekerasan anak tidak tertangani	9	kurangnya persiapan dan terbatasnya SDM	Adanya kasus pembulian	Bekerjasama dengan sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	korban kekerasan anak tidak tertangani	8	kurangnya persiapan dan terbatasnya SDM	Trauma terhadap anak	Optimalisasi UPTD PPA	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	Kurang tertanganinya anak yang memerlukan perlindungan	9	Terbatasnya SDM	Kurang maksimalnya perlindungan anak	Bekerjasama dengan LPSA	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase cakupan penyediaan informasi data keluarga	Kurangnya informasi data keluarga	6	data tidak terisikan	data tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan	Pemeriksaan data setiap bulan	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan dan KB	kurangnya data kependudukan dan KB	6	Data kependudukan dan KB kurang lengkap	data tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan	Pemeriksaan data setiap bulan	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Adanya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi	6	Adanya pasangan yang ingin anak segera	Tidak terencananya jarak kelahiran	Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah advokasi Program Bangsa Kencana dan KIE Pengendalian Penduduk dan	Kurang optimalnya KIE daldudk dan KB	6	Kurang menariknya media KIE	Kurangnya pengetahuan tentana KB	Optimalisasi kader KB	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sesuai Kearifan Budaya Lokal	KB							
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader KB yang terlatih	Kurang maksimalnya peran Petugas KB	9	Petugas KB banyak yang pensiun	Petugas KB yang tersedia kurang signifikan dengan daerah binaan	Optimalisasi PPKBD dan Sub PPKBD	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan	Kurangnya alokon yang tersedia	10	tidak tersalurkannya alokon dengan baik	Masyarakat kurang mampu tidak dapat memanfaatkan alokon gratis	Bekerjasama dengan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pati	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPk yang efektif	Kurang optimalnya kelompok kerja	9	Banyaknya kelompok kerja yang tidak aktif	Anggota kelompok kerja tidak aktif	Sosialisasi dan optimalisasi kegiatan di kampung KB	P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang meningkat kesejahteraan keluarganya	Penurunan keluarga sejahtera	6	Permasalahan keluarga meningkat	Keluarga kurang harmonis	Peningkatan kualitas keluarga melalui UPPKA	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah BKB, BKR, BKL yang tribina	Kurang optimalnya pembinaan tribina	4	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan tribina	Tidak tersalurkannya pengetahuan kepada masyarakat lewat tribina dengan baik		P3AKB	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pameran produk UPPKS dan jumlah peserta yang mengikuti pameran produk UPPKS	Kurang maksimalnya pameran UPPKS	9	Produk UPPKS kurang bervariasi	Kurang lakunya produk	Pemanfaatan produk UPPKS di setiap kegiatan KB	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2025 TW.I, II, III, IV

LAMPIRAN - LAMPIRAN